



MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM Mendukung SDGS



Siti Mutmainah, M.E.

Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.

Dr. Fauzan, S.Pd., M.Si.

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENDUKUNG SDGS

(Sustainable Development Goals)

**Siti Mutmainah, M.E.
Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
Dr. Fauzan, S.Pd., M.Si.**



Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung Sustainable Development Goals (SDGs)

© UIN KHAS Press, 2024

Penulis : Siti Mutmainah, M.E.
Dr. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S.Sos., M.Si.
Dr. Fauzan, S.Pd., M.Si.
Cover : UIN KHAS Press
Layout : Fathoni

Cetakan Pertama, September 2024

viii+78 hlm, 15 x 23 cm

ISBN : 978-623-89366-9-4

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

Diterbitkan oleh

UIN KHAS PRESS

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember Jawa Timur 68136

Website: <https://press.uinkhas.ac.id/>

Email: uinkhaspress@gmail.com | uinkhaspress@uinkhas.ac.id

Phone: (0331) 487550, (0331) 427005

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Model Pemberdayaan Masyarakat dalam Mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs)" ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan kehadirannya dapat menjadikan anugerah bagi umat manusia serta rahmat bagi seluruh alam, sehingga terciptanya kedamaian dan ketinggian ilmu pengetahuan didunia ini.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan wawasan, pengetahuan, dan inspirasi kepada pembaca tentang pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kunci sukses dalam mencapai SDGs yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Melalui pemberdayaan, masyarakat dapat menjadi subjek aktif dalam pembangunan, bukan sekadar sebagai objek atau penerima manfaat. Dengan memberdayakan masyarakat tersebut diharapkan terjadi peningkatan kesejahteraan, pengurangan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesetaraan gender, serta berbagai aspek lainnya yang menjadi fokus SDGs.

Buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian, kajian literatur, serta pengalaman praktis dari berbagai pihak yang terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, pengambil kebijakan, serta semua pihak yang memiliki perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada mereka semua yang senantiasa mendukung suksesnya penyelesaian penulisan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan dapat menjadi salah satu langkah kecil menuju tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan.

Akhir kata, kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran konstruktif demi pengembangan dan perbaikan, serta pengembangan lebih sempurna dalam kajian-kajian pemberdayaan masyarakat. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT. Amin.

Jember, September 2024

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
BAB II PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	5
A. Indikator Pemberdayaan Masyarakat	7
B. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat	9
C. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat	11
D. Strategi Pemberdayaan Masyarakat	12
E. Model Pemberdayaan Masyarakat	13
BAB III <i>SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS</i> (SDGs)	17
A. Pengertian <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	17
B. Tujuan <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	18
BAB IV MODEL-MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23
A. Model Pemberdayaan Masyarakat Kampung Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan	23
B. Model Pemberdayaan Masyarakat di Kampung <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	40
C. Model Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Sakinah dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender	63
Daftar Pustaka	73

BAB I

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. SDGs ditetapkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25-27 September 2015 yang menjadi agenda pada tahun 2030 (Simkiss, 2015: 235). Target SDGs dalam sidang umum PBB telah disepakati oleh 193 negara yang berkomitmen untuk menjalankan target SDGs dengan prinsip *no one leave behind* (tidak ada satupun yang tertinggal), setara dan inklusif. Kesepakatan tersebut kemudian dirumuskan menjadi visi dan misi TPB/SDGs dengan mengedepankan tiga dimensi pembangunan yaitu pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), pemerataan sosial (*social inclusion*) dan perlindungan terhadap lingkungan (*environmental protection*) yang dijabarkan dalam 17 tujuan dan 169 target (Bappenas, 2023: 23).

Indonesia mengembangkan tujuan SDGs yang telah ditetapkan oleh dunia dan disesuaikan dengan keadaan lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. *Sustainable Development Goals* (SDGs) telah diimplementasikan dalam agenda pembangunan nasional dan Visi Indonesia emas 2045. Indonesia menyakini agenda tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 tidak dapat tercapai tanpa adanya kerjasama multilateral. Beberapa tantangan seperti kualitas pendidikan, penciptaan lapangan kerja, kesenjangan sosial, perubahan iklim, perdamaian dan keadilan menjadi tantangan global dalam mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui

kerjasama multilateral, negara-negara dapat berbagi pengetahuan, sumber daya dan pengalaman untuk mencapai kemajuan bersama dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Bapenas, 2019:6). Indonesia bertekad untuk menjalankan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030 melalui program pemberdayaan untuk mengakhiri kemiskinan, menangani ketidaksetaraan, memajukan hak asasi manusia, dan memperhatikan kemajuan sosial, ekonomi, serta perlindungan lingkungan sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan (Sahara & Ramadhani, 2023: 62).

Dalam usaha mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, partisipasi masyarakat menjadi faktor kunci dalam setiap program yang dijalankan oleh pemerintah. Keterlibatan aktif masyarakat dapat diwujudkan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat. Priyono dan Pranarka (1996) dalam bukunya Sulistyani menyebutkan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti yaitu *to give power or authority* (memberikan kekuasaan kepada pihak yang kurang berdaya) dan *to give ability to or enable* (memberikan kekuasaan serta peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu) (Sulistyani, 2017:79). Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan seseorang terutama kelompok rentan atau kurang beruntung untuk menjadi berdaya atau mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat mempunyai kebebasan, tidak hanya kebebasan berpendapat tetapi juga kebebasan dari kebodohan, kemiskinan dan kelaparan. Pemberdayaan masyarakat yang efektif dapat meningkatkan kesejahteraan individu, menumbuhkan kemandirian, meningkatkan kemandirian, dan memastikan bahwa masyarakat mengikuti kemajuan tanpa bergantung pada pihak lain (Bahransyaf, 2012:38).

Konsep pemberdayaan masyarakat sejalan dengan ajaran Islam yang mengajarkan ketaatan kepada Tuhan dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat merupakan bentuk implementasi dari nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam. Pemberdayaan merupakan upaya yang terus menerus sebagai bagian dari proses perubahan menuju ke arah yang lebih baik

dalam mengubah kehidupan masyarakat (Tirmidzi, 2022:12). Prinsip perubahan dalam Islam tercermin dalam firman Allah SWT QS. Ar-Ra'd ayat 11:

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۖ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ [١١]

Artinya: “Baginya (manusia) ada (malaikat-malaikat) yang menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia” (QS. Ar-Ra'd [13]: 11).

Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah menekankan bahwa Dia tidak akan mengubah nasib suatu masyarakat kecuali mereka sendiri yang melakukan perubahan. Hal ini menggarisbawahi tanggung jawab manusia untuk berusaha dan berupaya mengubah keadaan mereka. Salah satu cara efektif untuk mendorong perubahan adalah melalui inisiatif pemberdayaan masyarakat. Upaya tersebut melibatkan kegiatan nyata dalam masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan memberdayakan individu untuk membuat pilihan yang mengarah pada peningkatan kualitas hidup di berbagai aspek kehidupan (Hendra, 2017:193).

Pemberdayaan masyarakat melibatkan proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk membuat pilihan yang tepat dan memengaruhi keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks SDGs, pemberdayaan masyarakat berarti memberikan alat, pengetahuan, dan sumber daya yang diperlukan agar mereka dapat berkontribusi secara efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Hal ini mencakup berbagai bidang mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga lingkungan. Pemberdayaan

masyarakat menjadi kunci dalam upaya mencapai SDGs karena melalui pemberdayaan, masyarakat dapat memiliki kapasitas, pengetahuan, dan sumber daya untuk berkontribusi secara aktif dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Buku ini hadir untuk memberikan wawasan dan panduan praktis mengenai pemberdayaan masyarakat dalam mendukung pencapaian SDGs. Dalam setiap bab, pembaca akan menemukan berbagai konsep, strategi, dan contoh kasus yang dapat dijadikan inspirasi dan referensi dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Selain itu, buku ini juga menekankan pentingnya pendekatan partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan dalam setiap inisiatif pemberdayaan masyarakat. Dengan memahami pembangunan berkelanjutan masyarakat akan menginspirasi untuk mengambil langkah konkret dalam upaya pemberdayaan komunitas mereka masing-masing. Dengan semangat berkolaborasi dan komitmen yang kuat, upaya pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan dunia yang lebih adil, sejahtera, dan berkelanjutan untuk generasi sekarang dan yang akan datang. □

BAB II

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata *daya* yang berarti kemampuan atau kekuatan. Pemberdayaan dimaknai sebagai proses menuju berdaya yang mana proses ini merujuk pada tindakan yang diberikan oleh orang yang memiliki daya kepada orang yang kurang berdaya agar dapat menjadi orang yang berdaya (Sulistiyani, 2017:77). Pemberdayaan merupakan istilah khas yang dipakai di Indonesia yang diterjemahkan dari kata *empowerment*. Konsep pemberdayaan menyiratkan kekuasaan formal dibandingkan kekuasaan substantif dan melibatkan lembaga eksternal di tingkat atas yang memberikan kekuasaan bukan orang-orang dibawahnya yang merebut kekuasaan tersebut (Mohanty, 1995:6).

Pemberdayaan dapat juga diartikan sebagai inisiatif memin-dahkan daya atau kemampuan misalnya pemerintah kepada pihak yang kurang daya seperti masyarakat. Pemberian daya ini diharapkan mampu mengubah keadaan masyarakat yang kurang mampu menjadi masyarakat yang berdaya dan mandiri. Priyono dan Pranarka (1996) dalam bukunya (Sulistiyani, 2017:79) menyebutkan bahwa pemberdayaan mengandung dua arti yaitu *to give power or authority* (memberikan kekuasaan kepada pihak yang kurang berdaya) dan *to give ability to or enable* (memberikan kekuasaan dan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu). Pemberdayaan masyarakat yang baik mampu meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, mewujudkan masyarakat yang mandiri, tidak bergantung kepada orang lain dan tidak tertinggal kemajuan (Bahransyaf dkk, 2012:38).

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keteringgalan (Mardikunto, 2013: 43). Pemberdayaan berkaitan dengan kemampuan seseorang terutama kelompok rentan atau kurang beruntung, untuk menjadi berdaya atau mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga dapat mempunyai kebebasan, tidak hanya kebebasan berpendapat tetapi juga kebebasan dari kebodohan, kemiskinan dan kelaparan. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan seseorang mampu mengakses sumber daya produktif yang dapat membantunya meningkatkan pendapatan untuk memenuhi kebutuhannya dan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan negara serta memberikan keputusan untuk mencapai kesejahteraan hidupnya.

Pemberdayaan masyarakat bisa tercapai targetnya difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokrasi dalam berpolitik, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Kesuksesan dalam upaya memberdayakan ekonomi masyarakat memerlukan faktor pendorong yang dapat mendukung terciptanya pemberdayaan. Faktor yang mendorong terwujudnya pemberdayaan ekonomi, yaitu:

1. Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari setiap rencana pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia dalam rangka pemberdayaan ekonomi harus ditangani secara serius dikarenakan sumber daya manusia merupakan elemen paling dasar untuk memperkuat perekonomian.

2. Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan suatu sumber pokok dari kegiatan pemberdayaan ekonomi yang bisa digunakan untuk mencukupi dan mengoptimalkan kebutuhan masyarakat.

3. Permodalan

Permodalan merupakan salah satu poin penting yang diperlukan dalam mendirikan usaha. Dalam permodalan harus dipahami tata cara memberi modal supaya tidak membuat masyarakat kecondongan dan permodalan harus mendukung, serta mendorong berbagai usaha baik mikro maupun menengah supaya dapat berkembang pesat.

4. Prasarana Produksi dan Pemasaran

Untuk mendorong produktifitas dan berkembangnya usaha diperlukan pemenuhan kebutuhan dalam bidang prasarana produksi dan pemasaran, agar hasil produksi dapat diperjual belikan di masyarakat. Ketersediaan infrastruktur pemasaran seperti sarana transportasi dari lokasi produksi ke pasar akan mengurangi rantai pemasaran dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, promosi yang dilakukan pengusaha mikro, kecil dan menengah perlu dilakukan baik itu melalui media cetak atau lewat media online agar produk yang dimiliki bisa diketahui masyarakat sehingga dapat meningkatkan hasil penjualan (Hutomo, 2000: 8).

A. Indikator Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut (Kieffer, 2017: 53) terdiri dari tiga dimensi yang meliputi kompetensi kerakyatan, kemampuan sosio-politik dan kompetensi partisipatif. Untuk mengetahui fokus dan tujuan pemberdayaan secara operasional, maka diperlukan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur seseorang telah berdaya atau tidak. Indikator pemberdayaan akan mempermudah dalam menjalankan program pemberdayaan sosial karena dapat mengetahui aspek-aspek mana saja yang perlu dioptimalkan.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang atau kelompok, khususnya kelompok yang rentan dan lemah sehingga memiliki kekuatan atau kemampuan untuk: 1) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga memiliki kebebasan (*freedom*); 2) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan kelompok lemah/rentan

untuk meningkatkan pendapatannya, dan memperoleh barang dan jasa yang dibutuhkan, dan; 3) berpartisipasi dalam pembangunan dan proses pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi kelompok lemah/rentan (Suharto, 2009: 57). Kemudian dalam melakukan pengukuran terhadap keberhasilan program pemberdayaan masyarakat, terdapat beberapa indikator sebagai berikut (Sumodiningrat, 1999:18):

1. Mengurangi jumlah penduduk miskin.
2. Berkembangnya usaha pendapatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.
3. Meningkatnya kemandirian kelompok, yang ditandai dengan berkembangnya usaha-usaha produktif anggota dan kelompok, permodalan kelompok yang lebih kuat, sistem administrasi kelompok yang lebih rapi, dan interaksi kelompok yang lebih luas dengan kelompok lain dalam masyarakat.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin di lingkungannya.
5. Meningkatnya kinerja masyarakat dan pemerataan pendapatan yang ditunjukkan dengan bertambahnya pendapatan bagi keluarga miskin yang mampu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial dasar.

Schuler, Hashemi dan Riley mengembangkan delapan indikator pemberdayaan yang dikenal dengan *empowerment index* atau indeks pemberdayaan, antara lain:

1. Kebebasan mobilitas: Kemampuan individu untuk pergi keluar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.
2. Kemampuan membeli komoditas kecil: Kemampuan individu untuk membeli barang-barang kebutuhan keluarga sehari-hari, dan kebutuhan dirinya.
3. Kemampuan membeli komoditas besar, kemampuan individu untuk membeli barang-barang sekunder dan tersier.

4. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan, mampu membuat keputusan secara sendiri maupun bersama orang lain mengenai keputusan internal.
5. Kebebasan relatif dari dominasi keluarga: informan ditanya mengenai apakah dalam satu tahun ada orang yang mencuri dan sebagainya.
6. Kesadaran hukum dan politik: mengetahui nama salah seorang pegawai pemerintah desa/kelurahan; seorang anggota DPRD setempat; nama presiden; mengetahui pentingnya memiliki surat nikah dan hukum-hukum waris.
7. Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes: seseorang dianggap “berdaya” jika ia pernah terlibat dalam kampanye atau bersama orang lain melakukan protes.
8. Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga (Schuler & Riley, 1996:635).

B. Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Di lain pihak, Lippit (1961) dalam tulisannya tentang perubahan yang terencana, (Planned Change) merinci tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat ke dalam 7 (tujuh) kegiatan pokok yaitu (Mardikunto, 2013: 87):

1. Penyadaran, yaitu kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk menyadarkan masyarakat tentang “keberadaannya”, baik keberadaannya sebagai individu dan anggota masyarakat, maupun kondisi lingkungannya yang menyangkut lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya, ekonomi, dan politik. Proses penyadaran seperti itulah yang dimaksudkan oleh Freire (1976) sebagai tugas utama dari setiap kegiatan pendidikan, termasuk di dalamnya penyuluhan;
2. Menunjukkan adanya masalah, yaitu kondisi yang tidak diinginkan yang kaitannya dengan: keadaan sumber daya (alam, manusia, sarana prasarana, kelembagaan, budaya, dan aksesibilitas), lingkungan fisik/teknis, sosial-budaya dan politis. Termasuk

dalam upaya menunjukkan masalah tersebut, adalah faktor-faktor penyebab terjadinya masalah, terutama yang menyangkut kelemahan internal dan ancaman eksternalnya;

3. Membantu pemecahan masalah, sejak analisis akar-masalah, analisis alternatif pemecahan masalah, serta pilihan alternatif pemecahan terbaik yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi internal (kekuatan, kelemahan) maupun kondisi eksternal (peluang dan ancaman) yang dihadapi;
4. Menunjukkan pentingnya perubahan, yang sedang dan akan terjadi di lingkungannya, baik lingkungan organisasi dan masyarakat (lokal, nasional, regional dan global). Karena kondisi lingkungan (internal dan eksternal) terus mengalami perubahan yang semakin cepat, maka masyarakat juga harus disiapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut melalui kegiatan “perubahan yang terencana”;
5. Melakukan pengujian dan demonstrasi, sebagai bagian dan implementasi perubahan terencana yang berhasil dirumuskan. Kegiatan uji coba dan demonstrasi ini sangat diperlukan, karena tidak semua inovasi selalu cocok (secara: teknis, ekonomis, sosial-budaya, dan politik atau kebijakan) dengan kondisi masyarakatnya. Di samping itu, uji coba juga diperlukan untuk memperoleh gambaran tentang beragam alternatif yang paling “bermanfaat” dengan risiko atau korbanan yang terkecil;
6. Memproduksi dan publikasi informasi, baik yang berasal dari “luar” (penelitian, kebijakan, produsen/pelaku bisnis, dan lainnya) maupun yang berasal dari dalam (pengalaman, *indigenous technology*, maupun kearifan tradisional dan nilai-nilai adat yang lain). Sesuai dengan perkembangan teknologi, produk dan media publikasi yang digunakan perlu disesuaikan dengan karakteristik (calon) penerima manfaat penyuluhannya;
7. Melaksanakan pemberdayaan/penguatan kapasitas, yaitu pemberian kesempatan kepada kelompok lapisan bawah (*grass-roots*) untuk bersuara dan menentukan sendiri pilihan-pilihannya (*voice and choice*) kaitannya dengan: aksesibilitas informasi,

keterlibatan dalam pemenuhan kebutuhan, serta partisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan, bertanggung jawab (akuntabilitas publik), dan penguatan kapasitas lokal.

C. Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Menurut beberapa penulis, seperti Solomon (1976), Rappaport (1981, 1984), Pinderhughes (1983), Swift (1984), Swift dan Levin (1987), Weick, Rapp, Sui ivan dan Kisthardt (1989), yang melakukan pembahasan tentang pemberdayaan (Suharto, 2009:68) dalam bukunya menjelaskan beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial, antara lain:

1. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif, pekerja sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner.
2. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
3. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
4. Kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
5. Solusi-solusi, yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
6. Jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang.
7. Masyarakat harus berpartisipasi dalam pemberdayaan mereka sendiri: tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
8. Tingkat kesadaran adalah kunci dalam pemberdayaan karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan.

9. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.
10. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif; permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
11. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

D. Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Dalam beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat saja dilakukan secara individual, meskipun pada gilirannya strategi ini tetap berkaitan dengan kolektivitas, dalam arti mengaitkan klien dengan sumber atau sistem lain diluar dirinya. Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu (Suharto, 2009: 66):

1. Aras Mikro, pemberdayaan dilakukan terhadap masyarakat (klien) secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing dan melatih dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut sebagai pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).
2. Aras Mezzo, pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok masyarakat (klien) pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan sekelompok sebagai media intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.
3. Aras Makro, pendekatan ini disebut juga sebagai strategi sistem besar, karena sasaran perubahan diarahkan pada sistem lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan, perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, lobbying, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan

ini. Strategi sistem besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

Dalam praktiknya, pemberdayaan seringkali melibatkan kombinasi dari ketiga matra ini. Pemberdayaan individu dapat membantu individu dalam kelompok untuk menjadi lebih kuat dan mandiri, sementara pemberdayaan kelompok dapat mendukung individu untuk berpartisipasi dalam usaha bersama yang lebih besar, seperti perubahan struktural dalam masyarakat. Selain itu, pemberdayaan struktural bisa memberikan kerangka kerja yang mendukung perubahan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan. Keseluruhan, tujuan dari ketiga matra ini adalah untuk menciptakan kondisi di mana individu dan kelompok dapat mengambil kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan memiliki peran yang lebih aktif dalam pembentukan masa depan mereka.

E. Model Pemberdayaan Masyarakat

Model pemberdayaan berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi ke depan dan berkelanjutan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Asy'ari (1997:141), model pemberdayaan masyarakat memiliki beberapa bentuk di antaranya:

1. Pelatihan

Pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi (Hamelik, 2001:10). Dengan pelatihan setiap peserta diberi gambaran mengenai konsep kewirausahaan dengan berbagai macam permasalahan. Selain itu masyarakat juga diberi

pemahaman terkait potensi yang bisa dimanfaatkan agar bisa dijadikan usaha.

2. Pendampingan

Departemen Sosial dalam penelitian (Rahmawati & Kisworo, 2017:164) mengartikan bahwa pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan atau fasilitas yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Proses pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi merupakan langkah yang diambil untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program pelatihan atau inisiatif pemberdayaan lainnya. Pendampingan melibatkan bimbingan dukungan dan bantuan teknis yang terus-menerus kepada individu atau kelompok yang sedang mengalami proses pemberdayaan. Didalam menjalankan sebuah usaha, diperlukan adanya suatu pendampingan dari orang-orang yang sudah ahli dibidangnya, yang dalam hal ini mempunyai fungsi untuk memberikan bimbingan terhadap usaha tersebut.

3. Permodalan

Modal menurut Frianto (2012) dalam penelitian (Dadek, 2021:23) merupakan uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usaha yang dapat menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Dalam pemberian modal ada hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana pemberian bantuan modal tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat dan juga dapat mendorong masyarakat agar dapat berkembang kearah yang lebih baik. Uang merupakan faktor penting dalam dunia usaha, agar memperoleh support keuangan yang konsisten harus ada sebuah hubungan yang menguntungkan dengan badan keuangan, baik itu perbankan maupun dana bantuan yang didistribusikan melalui kemitraan usaha lain.

4 Jaringan Bisnis

Tahapan pembinaan yang dilalui secara konsisten, sistematis dan dilakukan secara terus-menerus, proses selanjutnya perlu dibentuk jaringan bisnis yang saling melengkapi, memperkuat dan memperluas pasar.

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kapasitas, kemandirian dan partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah, membangun potensi serta meningkatkan kualitas hidup mereka. Konsep ini melibatkan pemberian pengetahuan, keterampilan, sumber daya dan akses kepada masyarakat agar mereka dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Konsep pemberdayaan ekonomi yang dijelaskan oleh Hutomo, bahwa praktik pemberdayaan dilakukan di masyarakat dengan berbagai model antara lain (1) bantuan modal (2) bantuan pembangunan prasarana (3) penguatan kelembagaan lokal (4) penguatan dan pembangunan kemitraan usaha (5) pendampingan (Hutomo, 2000: 32). □

BAB III

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)

A. Pengertian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Pembangunan merupakan suatu aspek penting dalam suatu negara karena dengan adanya pembangunan dapat dijadikan indikator penilaian bahwa suatu negara telah mengalami kemajuan (Muchlis et al., 2023:83). Dalam sidang umum PBB tahun 2015 disusun tujuan pembangunan berkelanjutan atau yang lebih sering dikenal dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan kelanjutan dari agenda *Millenium Development Goals* (MDGs) yang memiliki tujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Bappenas, 2019:45).

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan program pembangunan berkelanjutan yang disusun negara-negara anggota PBB pada 2015 dan diharapkan tercapai pada tahun 2030. SDGS (*Sustainable Development Goals*) memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan sosial, pelestarian lingkungan hidup, pembangunan inklusif dan tata kelola yang baik. Pemerintah mewujudkan komitmen politik untuk melaksanakan agenda SDGs, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peratu-

ran Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Perpres tersebut sekaligus merupakan komitmen agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak, baik pemerintah tingkat nasional maupun daerah, serta kelompok-kelompok masyarakat, antara lain akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil dan media. Pemerintah telah melaksanakan beberapa amanat dalam Perpres tersebut, antara lain:

1. Peta Jalan (*Roadmap*) Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan strategis tahapan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional hingga 2030 sesuai dengan sasaran pembangunan nasional;
2. Melalui Peraturan Menteri PPN/ kepala Bappenas Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2017-2029, dan;
3. Hingga tahun 2021 telah terbit 29 Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah (BPK, 2019: 3).

B. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan bentuk kesepakatan pembangunan baru yang mendorong ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan (Bappenas, 2019:10). *Sustainable Development Goals* (SDGs) memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai rencana aksi mengubah dunia (manusia, planet dan kemakmuran) dan 169 target yang ingin dicapai sebelum 2030 (Pizzi, 2020:12). 17 tujuan SDGs telah dirumuskan sebagai tujuan yang terpisah akan tetapi saling berkaitan satu sama lain secara sistematis dan dapat mempengaruhi secara positif atau negatif (Omer & Noguchi, 2020: 22).



Gambar 3.1. 17 Tujuan SDGs

SDGs atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan merupakan kebijakan pemerintah yang berlaku pula bagi seluruh negara karena sifatnya yang universal atau menyeluruh, terdiri dari:

1. *No poverty;*
2. *Zero hunger;*
3. *Good health and well-being;*
4. *Quality education;*
5. *Gender equality;*
6. *Cleanwater and sanitation;*
7. *Affordable and clean energy;*
8. *Decent work and economic growth;*
9. *Industry, innovation and infrastructure;*
10. *Reduced inequalities;*
11. *Sustainable cities and communities;*
12. *Responsible consumption and production;*
13. *Climate action;*
14. *Life below water;*

15. *Life on land*;
16. *Peace, justice and strong institutions*; dan
17. *Partnerships for the goals* (PPN/Bappenas, 2020:4).

Dengan potensi dan keadaan di Indonesia, tujuan yang telah ditetapkan oleh dunia telah dikembangkan untuk menyesuaikan dengan keadaan lingkungan, baik alam maupun sosial. Adapun tujuan tersebut antara lain:

1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk di manapun;
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan;
3. Memastikan kehidupan yang sehat dan mendukung kesejahteraan bagi semua untuk semua usia;
4. Memastikan pendidikan yang inklusif dan berkualitas setara, juga mendukung kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
5. Mencapai memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
6. Memastikan ketersediaan dan manajemen air bersih yang berkelanjutan dan sanitasi bagi semua;
7. Memastikan akses terhadap energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;
8. Mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tenaga kerja penuh dan produktif, juga pekerjaan layak bagi semua;
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, mendukung industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, juga membantu perkembangan inovasi;
10. Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara;
- 11; Membangun kota dan pemukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
12. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
13. Mengambil aksi segera untuk memerangi perubahan iklim dan

dampaknya;

14. Mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan maritim untuk pembanguna yang berkelanjutan;
15. Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi (penggurunan), dan menghambat dan membalikkan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati;
16. Mendukung masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua dan membangun intuisi-intuisi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua level, dan;
17. Memperkuat ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan (PPN/Bappenas, 2020: 4).

BAB IV

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Model Pemberdayaan Masyarakat Kampung Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan

Pemberdayaan masyarakat dapat tercapai targetnya apabila difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, demokrasi dalam berpolitik, mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang berkesinambungan dan saling berhubungan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan baik individu maupun kelompok masyarakat (Hadiyanti, 2008: 93). Proses pemberdayaan yang dilakukan di kampung zakat melalui beberapa tahapan sebagaimana menurut Totok Mardikunto (2013: 87), terdapat 7 (tujuh) tahapan, antara lain:

1. Tahap Penyadaran

Tahap penyadaran merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus kampung zakat dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat agar mereka mau turut serta dalam program pemberdayaan yang ditawarkan. Tahap penyadaran di kampung zakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi ketika ada acara di sekolah RA Nurzaman kepada ibu-ibu tentang pentingnya berkembang dan memiliki kegiatan atau usaha yang bermanfaat. Program pemberdayaan yang dilaksanakan di RA Nuruzzaman melalui sosialisasi ketika ada acara sekolah menunjukkan pendekatan yang strategis dan menyeluruh.

Metode ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan memberdayakan ibu-ibu untuk menjadi lebih mandiri dan produktif dalam perekonomian keluarga dan komunitas. Dengan demikian, program ini memiliki potensi untuk menghasilkan perubahan positif yang berkelanjutan dalam kehidupan para ibu dan keluarga mereka. Masyarakat diberikan pemahaman bahwa masyarakat harus aktif terlibat dalam kegiatan yang ada agar bisa memperbaiki taraf kehidupan mereka. Kampung zakat dalam menjalankan program tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan langsung tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mencapai kemandirian yang berkelanjutan. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang dinamika kebutuhan masyarakat serta komitmen untuk menciptakan perubahan positif yang bertahan lama.

Pada tahap penyadaran masyarakat memang sulit dilakukan karena masyarakat yang masih orang awam tidak mudah untuk menerima masukan dari pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, perlunya kegiatan sosialisasi ataupun pemberian nasehat yang dilakukan ketika ada acara muslimatan kepada ibu-ibu terkait potensi yang ada di desa ini yang bisa mereka manfaatkan. Masyarakat menerima dengan baik adanya inisiatif yang dilakukan oleh pengurus kampung zakat, mereka perlahan mulai sadar tentang pentingnya meningkatkan taraf perekonomian.

Program pemberdayaan bertujuan untuk membantu masyarakat beralih dari mustahik menjadi muzakki. Fokus pada pemanfaatan potensi lokal dan keterlibatan aktif masyarakat menunjukkan strategi yang komprehensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Masyarakat perlahan mulai sadar tentang pentingnya memanfaatkan potensi yang ada dan tidak bergantung pada bantuan dari luar. Program pemberdayaan di kampung zakat telah memiliki efek yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran dan kemandirian masyarakat. Pemahaman ini telah membantu individu mulai memanfaatkan potensi yang ada dan membangun usaha untuk meningkatkan ekonomi mereka. Kegiatan di kampung zakat

memberikan manfaat bagi ibu-ibu yang awalnya tidak mempunyai pekerjaan, mereka bisa bergabung dalam kelompok usaha di sana dan meningkatkan pendapatan mereka secara bertahap.

2. Tahap Menunjukkan Adanya Masalah

Tahap menemukan adanya masalah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan program pemberdayaan dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Upaya dalam menemukan permasalahan yang ada di kampung zakat dilakukan melalui kegiatan observasi secara langsung terkait kehidupan masyarakat. Pengurus kampung zakat melakukan observasi dan mengklasifikasikan kehidupan masyarakat berdasarkan dusun-dusun yang ada. Permasalahan yang ada di kampung zakat yaitu terkait kemiskinan, sulitnya akses pekerjaan sehingga banyak di antara masyarakat yang memilih bekerja ke luar kota bahkan ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan, masalah ibu-ibu janda yang menganggur serta bantuan yang diberikan secara konsumtif akan memberikan dampak ketergantungan kepada masyarakat.

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pengangguran, dan ketergantungan pada bantuan konsumtif di kampung zakat, diperlukan strategi yang fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penciptaan lapangan kerja. Perubahan model bantuan dari konsumtif menjadi produktif juga diperlukan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, dukungan khusus bagi keluarga yang ditinggalkan dan peningkatan akses terhadap lapangan kerja melalui kerja sama dengan sektor swasta dan pemerintah juga perlu diperhatikan.

3. Tahap Membantu Memecahkan Masalah

Tahap membantu memecahkan masalah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi

masyarakat Permasalahan yang ada di kampung zakat memerlukan solusi agar dapat tercipta masyarakat yang sejahtera dan mandiri dalam perekonomian. Pengurus kampung zakat melakukan diskusi untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang ada.

Dalam upaya menyelesaikan masalah kemiskinan di kampung zakat dilakukan dengan melihat potensi yang ada untuk dimanfaatkan sebagai solusi mengatasi masalah kemiskinan. Bantuan konsumtif yang diberikan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Kemenag belum mampu mengatasi kemiskinan secara efektif. Diskusi antar pengurus kampung zakat dilakukan untuk mencari solusi yang lebih efektif dalam mengatasi kemiskinan. Bantuan yang diterima sejauh ini belum dapat mengatasi masalah kemiskinan secara menyeluruh, karena lebih bersifat konsumtif dan tidak menyelesaikan sumber masalah. Bantuan konsumtif memiliki keterbatasan dalam memberikan solusi jangka panjang dan hanya dapat diberikan kepada sejumlah kecil orang. Oleh karena itu, pelatihan diusulkan sebagai alternatif yang dapat memberikan manfaat kepada lebih banyak orang. Meskipun pelatihan tidak memberikan modal langsung kepada individu, namun dapat memberikan pengetahuan tentang potensi desa yang dapat dikembangkan untuk membangun usaha.

Pelatihan mempunyai potensi dalam upaya pemberdayaan kepada lebih banyak orang dan memberikan manfaat jangka panjang melalui pengetahuan dan keterampilan. Dengan fokus pada pengembangan potensi desa, pelatihan dapat menjadi alat yang efektif dalam upaya mengatasi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pelatihan dilakukan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat agar mau berubah dan memperbaiki taraf hidup, akan tetapi keberhasilan dari program pelatihan ini tergantung pada kemauan dari masing-masing individu masyarakat. Pelatihan pembuatan keripik memberikan manfaat yang signifikan bagi peserta, tidak hanya dalam hal pengetahuan dan keterampilan tetapi dalam aspek ekonomi rumah tangga. Dengan kemampuan membuat keripik sendiri, peserta dapat mengurangi pengeluaran dan meningkatkan kualitas produk mereka, motivasi

dan komitmen untuk menerapkan ilmu yang didapat menunjukkan bahwa pelatihan ini efektif dan memberikan dampak positif. Pelatihan ini juga membuka peluang bagi peserta untuk memulai usaha rumahan, menambah sumber pendapatan, dan memperkuat ekonomi keluarga.

4. Tahap Menunjukkan Pentingnya Perubahan

Sosialisasi kepada masyarakat dalam upaya menyadarkan tentang pentingnya perubahan perlu dilakukan agar masyarakat sadar bahwasanya kehidupan seseorang itu perlu mengalami perubahan ke arah yang lebih baik. Pengurus kampung zakat melakukan sosialisasi acara pelatihan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya perubahan. Upaya menyadarkan pentingnya perubahan kepada masyarakat dilakukan melalui sosialisasi ketika ibu-ibu sedang mengikuti sekolah ibu-ibu yang ada di kampung zakat. Pentingnya memberikan nasihat kepada ibu-ibu agar mereka berupaya untuk berubah ke arah yang lebih baik tidak bisa diremehkan. Pemberian bimbingan dan motivasi kepada para ibu diperlukan untuk mendorong mereka mengupayakan perubahan dan perbaikan positif dalam kehidupan mereka. Program sekolah ibu-ibu (*mother school*) ini tidak hanya memberikan manfaat dalam hal pendidikan dan keterlibatan orang tua tetapi juga mendorong perubahan sosial menuju kemandirian dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Komunikasi langsung melalui forum-forum masyarakat merupakan strategi efektif untuk menyampaikan informasi dan memotivasi perubahan di masyarakat desa. Inisiatif pengurus kampung zakat dalam mengadakan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan ini memainkan peran penting dalam membangun kesadaran dan motivasi di kalangan masyarakat. Kesadaran yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tersebut merupakan langkah awal menuju pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup, yang meskipun bertahap, akan membawa perubahan positif yang signifikan bagi masyarakat. Dengan edukasi dan arahan yang tepat, kampung zakat berhasil membangun kesadaran dan motivasi yang meru-

pakan langkah awal penting menuju pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

5. Tahap Melakukan Melakukan Pengujian dan Demonstrasi

Dalam setiap permasalahan memerlukan solusi yang sesuai agar keberhasilan dari program pemberdayaan dapat terlihat dan efektif. Pihak kampung zakat melakukan uji coba inovasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang program pemberdayaan yang ada di sana. Tahap pengujian dan demonstrasi dilakukan melalui pengamatan terhadap potensi dan kehidupan masyarakat, semisal ketika akan diberi bantuan ternak dilihat terlebih dahulu kondisi masyarakat apakah memungkinkan ketika diberi bantuan ternak. Selain itu, ketika akan diadakan pelatihan terlebih dahulu dilakukan observasi terkait potensi yang bisa dikembangkan untuk usaha. Penilaian potensi usaha sebelum pelaksanaan program pelatihan di kampung zakat sangat penting, dengan melakukan evaluasi awal yang mendalam, program dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal, sehingga dapat lebih efektif dan berkelanjutan. Menentukan siapa yang akan mengisi acara pelatihan serta sumber pendanaan juga merupakan aspek penting dalam perencanaan, dengan melibatkan berbagai pihak dan sumber daya, baik internal maupun eksternal, program akan mendapatkan dukungan yang lebih baik untuk mencapai keberhasilannya.

Rencana pelatihan dapat dicoba terlebih dahulu kepada kelompok Nawang Wulan ketika rencana pelatihan sudah benar-benar matang; disosialisasikan kepada masyarakat supaya lebih banyak yang bisa mengikuti pelatihan. Evaluasi potensi sebelum melaksanakan pelatihan menunjukkan komitmen untuk memastikan relevansi dan efektivitas program. Sosialisasi yang dilakukan baik secara internal kepada anggota kelompok maupun eksternal kepada masyarakat luas adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat. Peran aktif pengurus kampung zakat dalam seluruh proses pelatihan sangat penting untuk

memastikan pelaksanaan yang baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi peserta.

6. Tahap Memproduksi dan Publikasi Informasi

Pemanfaatan informasi dari peraturan pemerintah dan pihak-pihak terkait diperlukan dalam menjalankan suatu program agar dapat membantu keberhasilan program yang ada. Publikasi informasi diperlukan untuk menyampaikan program yang ada di kampung zakat kepada masyarakat luas. Penyampaian informasi tentang program di kampung zakat kepada masyarakat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi. Sosialisasi tentang program pemberdayaan dilakukan melalui acara muslimatan, sekolah ibu-ibu, ketika malam jum'at dan ketika ada acara kumpulan wali murid RA Nuruzzaman. Melalui sosialisasi masyarakat dapat memahami program-program yang ada di kampung zakat dan manfaat yang dapat mereka peroleh. Sosialisasi membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang program-program yang tersedia, sehingga mereka dapat terlibat dan memanfaatkan program dengan lebih baik.

7. Tahap Melaksanakan Pemberdayaan

Kampung zakat memiliki program pemberdayaan yang fokus pada peningkatan ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dilakukan setelah melewati beberapa tahap dalam proses pemberdayaan. Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung Zakat bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama mereka yang awalnya tidak memiliki pekerjaan, agar bisa membangun pekerjaan sendiri. Pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui bantuan modal, pelatihan dan pendampingan untuk memastikan dampak dari kegiatan pelatihan.

Kegiatan pemberdayaan dilakukan melalui pelatihan pembuatan keripik yang mendatangkan rumah dari luar. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pelatihan berperan sebagai strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

pengalaman, baik dalam merancang, melaksanakan, dan mengelola kegiatan pemberdayaan yang dilakukan. Pelatihan juga membantu masyarakat memperoleh pengetahuan langsung dan praktis tentang cara membuat keripik, yang dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam membuat keripik dan meningkatkan potensi mereka untuk memiliki pekerjaan yang lebih baik. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan pemberdayaan dengan harapan dapat membantu meningkatkan perekonomian mereka.

Model pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung zakat Jember terdiri dari pelatihan, pendampingan, bantuan modal, dan jaringan bisnis. Hal ini sesuai dengan teori model pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh Asy'ari (1997: 141) bahwa model pemberdayaan memiliki beberapa bentuk antara lain:

a. Pelatihan

Keadaan sosial masyarakat di kampung zakat Jember terbilang cukup baik, akan tetapi kesejahteraan masyarakatnya tidak merata seperti desa-desa lain. Secara geografis kondisi lingkungan disana masih asri, tanahnya subur dan banyak terdapat sumber air, masyarakat disana ada yang jadi petani, pedagang dengan pendapatan masyarakat yang masih belum stabil sehingga kesejahteraannya belum terpenuhi. Dusun Palumbo Desa Sumbersalak Kecamatan Ledokombo terpilih menjadi Kampung Zakat binaan Kementerian Agama Negeri Jember dengan beberapa alasan salah satunya ialah karena banyaknya masyarakat yang menjadi imigran di luar maupun dalam negeri sehingga menyebabkan anak-anak, orang tua atau istri yang ditinggalkan kurang mendapatkan perhatian baik dalam segi pendidikan anak dan kebutuhan hidup sehari-hari. Pendapatan keluarga kurang stabil dikarenakan hanya menggantungkan diri pada tulang punggung keluarga yang menjadi imigran, bahkan tidak sedikit dari mereka yang memilih menetap di negeri orang karena mempertimbangkan pendapatan yang mereka dapat di desa tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup. Selain itu, permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan menuntut mereka harus pergi merantau demi menghidupi keluarganya.

Permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi tantangan yang serius bagi pemerintah atau tokoh masyarakat dalam upaya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di kampung zakat Jember permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi problem masyarakat yang memerlukan solusi agar mereka tidak memilih untuk menjadi pekerja di luar kota bahkan luar negeri. Pengurus Kampung zakat Jember berinisiatif dengan mengadakan pelatihan pembuatan keripik pisang, keripik dan rengginang dari singkong yang melibatkan masyarakat yang ada di Dusun Palu Ombo Desa Summersalak Kecamatan Ledokombo. Pelatihan pembuatan keripik ini dilakukan dengan melihat potensi sumber daya alam yang subur dan mudah ditemukannya pisang dan Singkong sehingga ketika diberikan pelatihan seperti ini tidak memerlukan biaya banyak untuk membuat keripik tersebut.

Pelatihan pembuatan keripik dan rengginang dari singkong dilakukan oleh Kampung zakat Jember bekerja sama bekerja sama dengan pihak PLN, dana yang digunakan untuk pelatihan diperoleh dari PLN melalui pengajuan proposal kegiatan pelatihan. Pelatihan ini dilakukan dengan mendatangkan Ibu Eni yang memang sudah berpengalaman dan memiliki usaha pembuatan keripik di rumahnya. Pelatihan ini sudah dilakukan selama dua kali dengan peserta yang hadir dalam acara pelatihan itu berjumlah sekitar 60 orang yang merupakan anggota muslimat, wali murid RA Nuruzzaman serta masyarakat sekitar.

Pada kegiatan pelatihan ini masyarakat diberikan motivasi tentang bagaimana membangun wirausaha agar muncul keinginan masyarakat untuk membangun usaha sendiri. Kemudian masyarakat diberikan pemahaman tentang tata cara pembuatan keripik, kemudian setelah dijelaskan mengenai tata cara pembuatannya masyarakat yang hadir langsung diarahkan untuk mempraktekannya secara langsung agar ilmunya benar-benar dipahami sehingga ketika mereka akan mempraktikkannya secara mandiri di rumah tidak akan kebingungan lagi. Sasaran objek pelatihan ini adalah ibu-ibu rumah tangga dengan harapan dapat tercapainya pember-

dayaan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya dikarenakan masih banyak lahan-lahan kosong di samping rumah warga yang belum dimanfaatkan untuk hal-hal produktif. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mereka bisa memanfaatkan lahan kosong tersebut untuk ditanami singkong sehingga dapat dimanfaatkan untuk membuat keripik yang akhirnya bisa dijual dan menambah pendapatan ekonomi masyarakat.

Hasil temuan dalam penelitian ini tentang model pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Oemar Hamelik yang berpendapat bahwa pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi (Hamelik, 2001:10). Pelatihan merupakan salah satu komponen kunci dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pelatihan individu atau kelompok dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan, mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi mereka sendiri. Kegiatan pelatihan yang melibatkan individu masyarakat dapat menjadikan mereka lebih mandiri secara ekonomi dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bambang dengan judul pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan kewirausahaan dan akses pembiayaan yang menunjukkan bahwa pelatihan kewirausahaan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan bisnis, peningkatan pendapatan dan adopsi inovasi di kalangan masyarakat (Bambang, 2023). Berdasarkan analisis peneliti terkait temuan di lapangan, hasil observasi, teori dan penelitian terdahulu tentang model pemberdayaan ekonomi dapat diketahui bahwa dengan adanya pelati-

han kewirausahaan yang dilakukan oleh pengurus Kampung zakat Jember dapat membantu masyarakat memperoleh pengetahuan baru tentang pembuatan keripik dan cara memanfaatkan peluang usaha. Masyarakat diajarkan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam yang subur dan singkong yang mudah ditemukan di sana untuk dikelola menjadi keripik yang nantinya bisa dikonsumsi sendiri dan diperjualbelikan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan dapat memunculkan inisiatif masyarakat untuk membangun usaha produktif dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di sekitarnya sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan perekonomian masyarakat.



Gambar 4.1. Kegiatan pelatihan di kampung zakat

b. Pendampingan

Pendampingan merupakan proses di mana individu atau kelompok yang lebih berpengalaman memberikan bimbingan saran dan dukungan kepada individu atau kelompok yang sedang berkembang. Pendampingan ini dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan strategi bisnis, mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada. Proses pendampingan dilakukan oleh pengelola Kampung zakat Jember kepada kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok usaha Nawang Wulan dan pendampingan kepada masyarakat yang sudah pernah ikut pelatihan pembuatan keripik dan rengginang dari singkong agar progres ilmu

yang mereka dapatkan selama pelatihan bisa benar-benar mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan mendirikan usaha atau membuat keripik untuk memenuhi kebutuhan pribadi sehingga tidak perlu membeli di pasar. Proses pendampingan ini juga dipantau oleh pihak PLN selaku pemberi dana pada acara pelatihan pembuatan keripik. Pihak PLN akan menanyakan terkait perkembangan masyarakat yang sudah mendapat pelatihan pembuatan keripik dengan harapan mereka sudah mulai membuka usaha sendiri sehingga dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Hasil temuan dalam penelitian ini mengenai model pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Departemen Sosial dalam penelitian (Rahmawati & Kisworo, 2017:164) bahwa pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan atau fasilitas yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Proses pendampingan dalam pemberdayaan ekonomi merupakan langkah yang diambil untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program pelatihan atau inisiatif pemberdayaan lainnya. Pendampingan melibatkan bimbingan dukungan dan bantuan teknis yang terus-menerus kepada individu atau kelompok yang sedang mengalami proses pemberdayaan.

Proses pendampingan yang dilakukan oleh pengurus Kampung zakat Jember dilakukan untuk memantau terhadap kemajuan yang didapatkan dan melakukan evaluasi terhadap hasil yang telah dicapai dengan adanya pelatihan pembuatan keripik dan rengginang dari singkong. Proses pendampingan yang dilakukan oleh pengurus Kampung zakat Jember bertujuan untuk membangun jaringan dan koneksi agar permasalahan yang ada di kampung zakat Jember bisa teratasi atas bantuan dari pihak-pihak lain seperti yang dilakukan oleh pihak PLN dengan memberikan dana untuk pelatihan pembuatan keripik dan rengginang. Pihak PLN akan melakukan evaluasi dan menanyakan progres dan perkembangan dari pelatihan yang

telah dilakukan setiap bulan kepada pengurus Kampung zakat Jember. Proses pendampingan ini memiliki tujuan untuk membangun kemandirian masyarakat dan ketika kemandirian masyarakat sudah terlihat maka proses pendampingan terhadap masyarakat bisa dihentikan secara bertahap.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Khoirun et al., 2020) tentang Pendampingan Pemberdayaan Potensi Masyarakat Dalam Bidang Pertanian Dan Home Industry Pertanian Di Desa Butuh Kras Kediri Pada Masa Pandemi Covid-19 yang menunjukkan bahwa proses pendampingan potensi lokal pertanian dan *home industry* yang dilakukan oleh masyarakat dalam mengembangkan home industry dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Dusun Sumberkepuh Desa Butuh Kecamatan Kras Kabupaten Kediri yang berupa SDA dan SDM dengan tujuan agar masyarakat memiliki potensi yang bermanfaat serta mengetahui kondisi dan peluang sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap hasil observasi, temuan di lapangan, teori dan penelitian terdahulu tentang model pemberdayaan ekonomi melalui pendampingan dapat diketahui bahwasanya dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh pengurus Kampung zakat Jember dan pihak pemberi dana pelatihan dapat membantu dan memanfaatkan perkembangan perekonomian masyarakat setempat. Pendampingan ini dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari pelatihan yang telah dilakukan sebelumnya dengan harapan adanya pelatihan dapat memberikan motivasi dan membantu masyarakat dalam membangun usaha sehingga dapat meningkatkan kemandirian dan pendapatan ekonomi.

c. Pemberian Modal

Pemberian modal dapat dilakukan melalui bantuan keuangan, pinjaman modal usaha atau modal lainnya. Modal ini dapat digunakan untuk memulai atau mengembangkan usaha, meningkatkan akses terhadap teknologi atau meningkatkan infrastruktur produksi.

Di Kampung Zakat Jember bantuan modal diberikan kepada suatu wirausahawan untuk pengembangan usaha, modal tidak diberikan sebagai modal awal membangun usaha akan tetapi diberikan kepada usaha yang memang sudah ada dan menunjukkan perkembangan penjualan yang cukup baik sehingga diharapkan adanya tambahan modal dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat.

Pemberian modal yang ada di kampung zakat Jember berasal dari dana Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang ada di Kabupaten Jember. Pemberian modal ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, selain pemberian modal usaha ada juga pemberian bantuan hewan ternak kepada 20 penerima berupa anak ayam dengan harapan dapat berkembang biak sehingga membantu menambah pendapatan masyarakat. Dalam penerapannya pemberian bantuan hewan ternak menurut pengurus kampung zakat Jember kurang optimal dikarenakan ketika dilakukan evaluasi terkait kelanjutan dari bantuan hewan ternak pada penerima ternyata hewannya sudah mati dan ada yang sudah disembelih. Melihat kondisi yang seperti ini ketika hewannya ternyata mati proses pemberdayaan ekonomi melalui bantuan hewan ternak akan terhenti dikarenakan tidak ada kelanjutan dan peningkatan pendapatan masyarakat.

Hasil temuan dalam penelitian ini tentang model pemberdayaan ekonomi melalui pemberian bantuan modal sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Frianto (2012) dalam penelitian (Dadek, 2021) bahwa modal merupakan uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usaha yang dapat menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Dalam pemberian modal ada hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana pemberian bantuan modal tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat dan juga dapat mendorong masyarakat agar dapat berkembang kearah yang lebih baik.

Hasil penelitian juga didukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Prakoso & Arum, 2023) tentang Pengaruh Bantuan Modal dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mik-

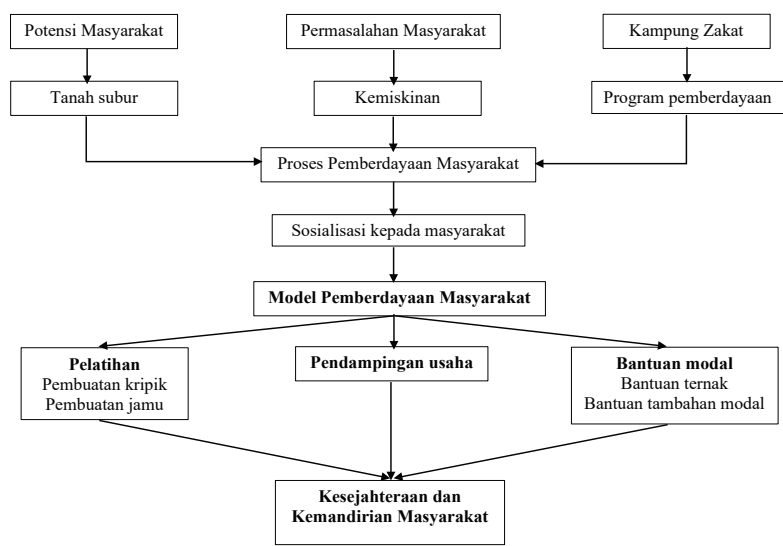
ro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul yang menemukan bahwa pemberian bantuan modal dan pendampingan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kasian, Kabupaten Bantul.

Di kampung zakat Jember pemberian modal usaha diberikan kepada UMKM yang sudah berjalan, modal ini diberikan sebagai tambahan untuk mengembangkan usaha agar bisa menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Pemberian modal yang diberikan oleh pengurus kampung zakat Jember sudah mampu meningkatkan pendapatan UMKM yang ada disana. Selain itu, modal yang diberikan bukan hanya dalam bentuk uang saja akan tetapi masyarakat juga diberikan bantuan modal berupa hewan ternak untuk usaha peternakan, dengan harapan hewan yang diberikan dapat beranak-pinak sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.



Gambar 4.2 Kegiatan pemberian bantuan ternak

Gambar 4.3. Model Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Zakat Jember



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Kehidupan masyarakat di kampung zakat Jember rata-rata berprofesi sebagai petani dan kebanyakan dari mereka belum mengerti tentang dunia usaha memunculkan inisiatif pengurus Kampung zakat Jember membentuk kelompok usaha Nawang Wulan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berwirausaha bersama agar dapat menambah pendapatan ekonominya. Kelompok usaha Nawang Wulan memiliki produk utama jamu dan kue kering yang sudah dipasarkan di Tanoker Jember dan di BUMNU Jember. Pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung zakat Jember dilakukan sebagai upaya untuk mendukung salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dari peneliti tentang model pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung zakat Jember dapat diketahui bahwa pemberdayaan masyarakat yang

ada disana sudah membantu dan mendukung dalam mengurangi kemiskinan yang ada di kampung zakat Jember. Hal ini terlihat dari anggota kelompok usaha Nawang Wulan yang mana merupakan wadah bagi masyarakat untuk membangun usaha bersama sudah ada yang dapat membuka usaha sendiri di rumahnya dan dapat menjualkan produknya ke masyarakat sekitar. Keberhasilan pemberdayaan di kampung zakat dalam meningkatkan pendapatan masyarakat kelompok usaha nawang wulan dapat dilihat dari peningkatan pendapatan anggota nawang wulan sebelum dan sesudah adanya kegiatan pemberdayaan yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Perbedaan pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah adanya kegiatan pemberdayaan di kampung zakat

No	Pendapatan	Jumlah masyarakat		Presentase (%)	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	<1.000.000	11	2	21,54	3,08
2	1.000.000 – 1.499.999	9	4	13,85	6,15
3	1.500.000 – 1.999.999	14	18	23,08	30,77
4	2.000.000 – 2.499.000	11	16	16,92	24,61
5	2.500.000 – 2.999.999	9	7	13,85	10,76
6	>3.000.000	6	13	10,77	24,61
		60	60	100	100

Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terjadi peningkatan pendapatan masyarakat yang menjadi anggota kelompok usaha Nawang Wulan setelah mengikuti kegiatan pemberdayaan yang ada di sana. Pemberdayaan masyarakat telah mampu mem-

bekali individu dan masyarakat dengan keterampilan, pengetahuan, dan sumber daya, inisiatif mereka untuk terlibat dalam kegiatan produktif, memulai usaha, dan menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat ini berkontribusi langsung terhadap pengentasan kemiskinan dan peningkatan taraf hidup. Selain itu, program pelatihan pembuatan kripik merupakan upaya untuk memberikan pemahaman tentang dunia usaha dan cara membangun usaha secara mandiri agar masyarakat tidak selalu bergantung kepada bantuan dari pemerintah atau lembaga lain.

B. Model Pemberdayaan Masyarakat di Kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) Jember

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi serta membentuk masyarakat yang mandiri secara ekonomi. Pemberdayaan ekonomi berkaitan erat dengan proses pembangunan suatu daerah dikarenakan dengan berkurangnya masyarakat kurang mampu akan meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah (Sahara & Ramadhani, 2023: 3). Kampung SDGs merupakan bentuk upaya yang dilakukan oleh kelompok masyarakat yang peduli terhadap kelompok-kelompok lemah untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal terutama di daerah pedesaan atau perkampungan. Kampung SDGs memiliki tujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip dan tujuan SDGs ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di tingkat kampung atau desa. Upaya ini mencakup berbagai kegiatan seperti peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, kebutuhan pangan, energi bersih serta pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat.

Kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam kampung SDGs terdiri dari berbagai pihak termasuk warga lokal, organisasi masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, akademisi dan sektor swasta. Mereka bekerja sama untuk merancang dan melaksanakan program-program yang dapat mendukung pencapaian SDGs

di tingkat kampung dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi lokal yang ada.

Pusat Pengembangan Kampung SDGs Indonesia (PPKSI) adalah sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang fokus pada pencapaian SDGs level kampung atau dusun. PPKSI memiliki peran aktif dalam mengembangkan kampung SDGs di Indonesia. Kampung SDGs mengadopsi tujuan dari SDGs Internasional disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan lokal dan permasalahan yang ada di masyarakat. Tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) dibagi ke dalam empat pilar yaitu sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola. Tujuan Kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) disesuaikan dengan kearifan lokal, permasalahan dan kebutuhan masyarakat, sehingga PPKSI merangkum 17 tujuan SDGs menjadi 13 tujuan dengan dibagi menjadi 4 pilar yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar tata kelola dan pilar lingkungan.

Tabel 4.2 Pilar Kampung SDGs

Pilar Sosial	Pilar Ekonomi	Pilar Tata Kelola	Pilar Lingkungan
Kampung anti kemiskinan	Kampung ekonomi maju dan kreatif	Kampung ramah anak	Kampung dengan air bersih dan sanitasi
Kampung ketahanan pangan	Kampung non disparitas	Kampung damai dan inklusi	Kampung dengan rumah tinggal layak
Kampung sehat dan sejahtera	Kampung sinergi dan kemitraan berkelanjutan		Kampung perubahan iklim
Kampung cerdas			
Kampung ramah gender			

Sumber: Dokumentasi PPKSI yang diolah peneliti (2024)

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang model pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan kampung ketahanan pangan dan kampung ekonomi maju dan kreatif yang ada di kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) Sukorejo Kecamatan Bangsalsari. Proses pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang berkesinambungan dan saling berhubungan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan baik individu maupun kelompok masyarakat. Proses pemberdayaan yang dilakukan di kampung SDGs melalui beberapa tahapan sebagaimana menurut Totok Mardikunto ada 7 tahapan, antara lain: (Mardikunto, 2013:87)

1. Tahap Penyadaran Masyarakat

Tahap penyadaran merupakan langkah awal yang sangat penting dalam proses pemberdayaan yang dilakukan oleh pengurus kampung SDGs dengan tujuan untuk menarik minat masyarakat agar mereka mau turut serta dalam program pemberdayaan yang ditawarkan. Pengurus kampung SDGs melakukan upaya penyadaran masyarakat melalui kegiatan sosialisasi, akselerasi (percepatan) dan diseminasi (penyebarluasan ide dan gagasan). Upaya dalam menyadarkan masyarakat dilakukan melalui sosialisasi ketika pertemuan rutin majelis ta'lim setiap malam selasa untuk menyebarkan informasi, ilmu tentang ekonomi islam yang mencakup empat pilar penting yaitu ekonomi berkebutuhan, ekonomi berkemanusiaan, ekonomi berkeadilan, dan ekonomi bernilai akhlak. Masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya memenuhi kebutuhan hidup dan mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, serta mengentaskan kemiskinan.

Tahap penyadaran masyarakat bukan hanya memberikan informasi tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk mengambil tindakan nyata dalam meningkatkan kesejahteraan mereka berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Kebutuhan ekonomi menjadi keperluan pokok dalam menunjang kehidupan masyarakat dikarenakan ketika ekonomi seseorang terpenuhi akan mudah dalam mewujudkan kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan bahkan dapat

membantu masyarakat yang lain. Sosialisasi kepada masyarakat melalui khutbah jum'at, yasinan malam jum'at dan majelis ta'lim dilakukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa dalam hidup ini kita harus mengusahakan kesejahteraan kita sendiri bukan hanya dengan menunggu bantuan orang lain.

2. Tahap Menunjukkan Adanya Masalah

Upaya yang dilakukan untuk menemukan permasalahan yang ada di kampung SDGs dilakukan melalui observasi tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi masyarakat. Permasalahan yang dihadapi masyarakat adalah masyarakat kurang mampu, sulitnya lapangan kerja, harga pupuk yang mahal dan kebanyakan ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan serta potensi lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan untuk hal produktif. Permasalahan harga pupuk mahal yang ada di kampung SDGs hampir dirasakan oleh sebagian masyarakat yang memiliki profesi sebagai petani. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang tidak mau bekerja keras dalam memenuhi kebutuhannya juga menjadi problem yang menyebabkan kebutuhan mereka tidak terpenuhi. Dalam hidup ini manusia diperintahkan untuk berusaha sendiri jika ingin mengubah nasib kita sendiri akan tetapi permasalahan yang ada dimasyarakat ialah mereka yang malas bekerja dan ingin sukses.

3. Tahap Membantu Memecahkan Masalah

Tahap membantu memecahkan masalah dalam pemberdayaan masyarakat merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa solusi yang diterapkan benar-benar efektif dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses penyelesaian masalah di Kampung SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif yang memberdayakan anggota masyarakat untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi tantangan lokal secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dan menggabungkan kerangka tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) untuk memastikan solusi yang

komprehensif dan jangka panjang.

Upaya yang dilakukan di kampung SDGs dalam memecahkan masalah melalui kegiatan musyawarah kelompok tani tentang permasalahan yang dihadapi. Para petani akan saling berdiskusi tentang pupuk atau obat hama yang mereka ketahui agar bisa digunakan oleh masyarakat yang lain sedangkan untuk masalah pengangguran dan akses pekerjaan yang sulit dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan sabun, budidaya jamur agar masyarakat bisa membuka usaha sendiri. Selain itu, untuk memotivasi masyarakat yang tidak mau bekerja keras dilakukan dengan pendekatan dan nasehat tentang hidup yang harus layak agar mereka mau berusaha.

4. Tahap Menunjukkan Pentingnya Perubahan

Proses pemberdayaan masyarakat di kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) melibatkan beberapa tahap yang menunjukkan pentingnya perubahan dan memastikan bahwa perubahan tersebut berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Tahap menunjukkan pentingnya perubahan dalam proses pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memastikan bahwa proses tersebut tetap relevan, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Tahap menunjukkan pentingnya perubahan dilakukan melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat tentang kehidupan seseorang harus mengalami perubahan. Masyarakat sudah mulai paham dalam perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan pendapatan dalam bidang pertanian. Masyarakat biasanya melakukan diskusi sesama petani untuk mencari solusi ketika ada masalah agar ditemukan solusi yang menguntungkan, karena pada dasarnya tidak ada masyarakat yang ingin mengalami kerugian.

Masyarakat mulai sadar tentang pentingnya pemberdayaan dalam kehidupan dan harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi menjadi keperluan pokok dalam menunjang kehidupan masyarakat dikarenakan ketika ekonomi seseorang terpenuhi akan mudah dalam mewujudkan kebutuhan

lain seperti pendidikan, kesehatan bahkan dapat membantu masyarakat yang lain.

5. Tahap Melakukan Melakukan Pengujian dan Demonstrasi

Tahap pengujian dan demonstrasi adalah langkah penting dalam proses penyelesaian masalah, terutama dalam konteks pemberdayaan masyarakat di Kampung SDGs. Langkah ini bertujuan untuk menguji solusi yang telah dirancang dalam skala kecil atau uji coba untuk mengumpulkan data mengenai efektivitas, efisiensi, kesesuaian solusi dan dampaknya terhadap masyarakat. Uji coba dan penyampaian informasi yang dilakukan di kampung SDGs dalam proses pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan bahwa ketika ditemukan inovasi baru maka masyarakat akan dikumpulkan untuk diberikan informasi agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada inovasi tentang pembuatan pupuk organik akan disampaikan kepada masyarakat terkait langkah-langkah pembuatannya. Upaya ini dilakukan untuk mencoba inovasi yang ditemukan terkait kecocokannya menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat tentang mahalnya harga pupuk. Dalam kegiatan pemberdayaan melalui pembuatan sabun cuci piring pada awal menemukan inovasi kandungan zat kimia yang dipakai di uji di laboratorium terlebih dahulu sebelum disosialisasikan dan diadakan pelatihan kepada masyarakat.

6. Tahap Memproduksi dan Publikasi Informasi

Tahap memproduksi dan publikasi informasi dalam proses pemberdayaan merupakan langkah penting yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan kepada masyarakat dapat memberikan dampak positif dan mendorong perubahan yang diinginkan. Dalam hal ini memberdayakan masyarakat dilakukan memudahkan masyarakat mengakses, menghasilkan, berbagi, dan memanfaatkan informasi secara efektif untuk meningkatkan pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan kesejah-

teraan mereka secara keseluruhan.

Penyampaian informasi yang dilakukan kepada mahasiswa akan berbeda dengan penyampaian informasi ke masyarakat, penyampaian informasi yang dilakukan kepada masyarakat lebih ditekankan langsung pada praktek pemberdayaannya. Dalam penerapan tujuan SDGs mengurangi kemiskinan dan menjaga ketahanan pangan, solusi dalam mengatasi masalah kemiskinan langsung disampaikan kepada masyarakat. Di kampung SDGs inisiatif dalam memanfaatkan lahan pekarangan diawali dengan pemberian bibit tomat, cabe dan sayur agar ditanam masyarakat di sekitar rumahnya.

7. Tahap Melaksanakan Pemberdayaan

Tahap melaksanakan pemberdayaan melibatkan serangkaian langkah untuk mewujudkan upaya pemberdayaan dalam suatu konteks tertentu, seperti pemberdayaan masyarakat, individu, atau kelompok tertentu. Implementasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kampung SDGs merupakan tahapan penting dimana strategi dan tindakan yang direncanakan dipraktikkan yang melibatkan partisipasi aktif anggota masyarakat, pemangku kepentingan, dan fasilitator untuk mewujudkan perubahan positif dan berkelanjutan di masyarakat.

Tahap pelaksanaan program pemberdayaan dilakukan setelah sebelumnya tanah yang ada di kampung SDGs diklasifikasi terlebih dahulu kemudian diidentifikasi potensi dari setiap jenis tanah sebelum disampaikan ke masyarakat agar memanfaatkan dengan semestinya. Dalam upaya memanfaatkan tanah pekarangan, kegiatan berbagi bibit juga diajarkan kepada anak Paud agar mereka bisa belajar berbagi sejak dini. Dalam pelaksanaan programnya kampung SDGs bekerjasama dengan pihak lain seperti Ormas NU, Fatayat atau dengan perusahaan yang mau bekerjasama seperti Perusahaan ANJ dan Ma'rifat Bisnis yang bekerjasama dalam bidang pertanian. Kerjasama dilakukan untuk menambah pengetahuan, berbagi pengalaman dan mensupport setiap kegiatan yang ada di kampung

SDGs agar masyarakat semangat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan.

Model pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pemberian modal dan jaringan bisnis dapat dilakukan melalui berbagai bentuk yang berbeda yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan akses terhadap sumber daya alam serta peluang ekonomi bagi masyarakat. Penelitian ini menemukan model pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung SDGs (*Sustainable Development Goals*) dalam mewujudkan ketahanan pangan dan ekonomi maju dan kreatif sesuai dengan model pemberdayaan menurut Asy'ari (1997), sebagai berikut:

a. Pelatihan

Program dalam upaya mewujudkan kampung ekonomi maju dan inklusif antara lain; Pemanfaatan ekonomi kreatif dilakukan untuk membentuk kemandirian ekonomi pada masyarakat. Kemandirian ekonomi ditandai dengan kemampuan berpikir memutuskan dan melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah yang dihadapi dengan menggunakan daya dan kemampuan yang dimiliki seseorang. Pelatihan di kampung SDGs dilakukan melalui kegiatan, sebagai berikut:

1) Pembuatan Sabun Cuci Bunda

Kampung SDGs memiliki tujuan menjadi kampung ekonomi maju dan kreatif melalui kegiatan pelatihan pembuatan sabun cuci piring kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang ada di kampung SDGs Sukorejo salah satunya dilakukan melalui program pelatihan pembuatan sabun cuci yang diberi nama sabun cuci bunda. Program ini melibatkan masyarakat sekitar yang kurang mampu dan janda yang tidak berpenghasilan tetap dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Hasil temuan dalam penelitian ini tentang model pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pelatihan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Oemar Hamelik yang berpendapat bahwa

pelatihan adalah suatu proses yang meliputi serangkaian tindakan atau upaya yang dilaksanakan dengan sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kepada tenaga kerja yang dilakukan oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi (Hamelik, 2001:10). Pelatihan merupakan salah satu komponen kunci dalam pemberdayaan masyarakat, melalui pelatihan individu atau kelompok dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menciptakan, mengelola dan mengembangkan usaha ekonomi mereka sendiri. Kegiatan pelatihan yang melibatkan individu masyarakat dapat menjadikan mereka lebih mandiri secara ekonomi dengan mengembangkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada bantuan dari luar.



Gambar 4.4 Kegiatan pembuatan sabun cuci piring

2) Budidaya Jamur Tiram

Kampung SDGs memiliki tujuan menjadi kampung ekonomi maju dan kreatif melalui kegiatan pelatihan budidaya jamur dilakukan kepada ibu-ibu agar mereka bisa memiliki ilmu untuk membangun usaha sehingga dapat menambah pendapatan. Adanya pelatihan yang dilakukan pengurus kampung SDGs memberikan dampak positif kepada kehidupan masyarakat. Jamur tiram yang dihasilkan dijual langsung kepada masyarakat dan ada yang dijual

dengan diolah menjadi jamur krispi yang kemudian dijual kepada masyarakat sekitar.



Gambar 4.5 Kegiatan pelatihan usaha kepada masyarakat

3) *Integrated Faming*

Upaya untuk mendukung ketahanan pangan yang ada di kampung SDGs Sukorejo adalah dengan membentuk program *integrated farming* dengan mengintegrasikan peternakan dan pertanian, yang memanfaatkan kotoran ternak, kotoran kambing untuk dijadikan pupuk tanaman yang ada di Rumah Pangan Lestari dan di sawah warga. Pemanfaatan kotoran kambing dilakukan agar memudahkan warga dalam pemenuhan pupuk untuk tanaman dikarenakan harga pupuk kimia yang saat ini mahal serta prosedur pembelannya yang sulit dan langka. Dengan adanya *integrated faming* dapat membantu masyarakat agar bisa mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting dalam menunjang perekonomian pada setiap negara di dunia termasuk Indonesia. Sektor pertanian menjadi penyedia kebutuhan pangan baik pangan hewani maupun pangan nabati. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi dan berbagai permasalahan gejala

sosial seperti kemiskinan dan kelaparan (Hasan et al., 2018:2). Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional memerlukan langkah, pendekatan dan strategi yang bersifat berkelanjutan. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi permasalahan kompleks yang mempengaruhi kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yaitu melalui konsep sistem pertanian terintegrasi ternak tanaman secara terpadu atau yang dikenal dengan istilah *integrated farming*.



Gambar 4.6 Kegiatan *integrated farming*

Model integrasi tanaman ternak yang dikembangkan di beberapa daerah dan berorientasi pada konsep sistem produksi tanpa limbah (*zero waste production system*) yaitu seluruh limbah dari ternak dan tanaman didaur ulang dan dimanfaatkan kembali ke dalam siklus produksi. Komponen usaha tani-ternak dalam model ini meliputi usaha sapi potong (ruminansia) dengan tanaman pangan (padi atau jagung), usaha ternak dengan hortikultura atau sayuran, usaha ternak dengan perkebunan (tebu, kelapa dan kelapa sawit). Limbah ternak atau kotoran hewan diproses menjadi kompos dan pupuk organik serta biogas sedangkan limbah pertanian seperti jerami padi, batang, daun jagung, tebu, jerami, kedelai dan kacang tanah

diproses menjadi pakan ternak (Hasan et al., 2018:2). Pembangunan pertanian berbasis integrasi ternak tanaman dalam implementasinya tidaklah mudah. Memadukan dua kepentingan mendasar yakni produktivitas dan kelestarian sumber daya alam bukanlah persoalan yang mudah karena membutuhkan kerjasama yang lebih luas antar berbagai kemampuan manajemen pengelolaan yang lebih kompleks serta pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha untuk berinovasi. Keberhasilan dalam mengimplementasikan pendekatan pertanian berkelanjutan sangat ditentukan oleh teknologi, kondisi budaya dan sosial masyarakat setempat. Pertanian berkelanjutan secara implisit menyiratkan kebutuhan pengelolaan sumber daya alam yang harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan setempat (Pretty, 2006:4).

Di kampung SDGs Sukorejo ada program *integrated farming* dengan mengintegrasikan peternakan dan pertanian, yang memanfaatkan kotoran kambing untuk dijadikan pupuk tanaman yang ada di Rumah Pangan Lestari dan di sawah warga. Proses penerapan *integrated farming* di kampung SDGs Sukorejo dilakukan untuk memudahkan masyarakat dalam pemenuhan pupuk untuk tanaman. Masyarakat diberikan pemahaman tentang bagaimana cara mengintegrasikan antara peternakan dan pertanian agar mereka mampu memanfaatkan kotoran hewan untuk dijadikan pupuk pada tanaman hortikultura ataupun tanaman padi dan jagung yang mereka tanam di sawah. Masyarakat diberikan edukasi dan pelatihan tentang proses pembuatan pupuk organik dari kotoran kambing dan pupuk air nutrisi tanaman dari sisa-sisa sayuran dan buah-buahan. Pelatihan ini diajarkan oleh Bapak Imron kepada para petani yang ada di kampung SDGs Sukorejo dengan harapan dapat membantu mengurangi permasalahan petani yang kekurangan pupuk dan harga pupuk kimia yang mahal. Dalam penerapan *integrated farming* di kampung SDGs sesuai dengan teori yang disampaikan oleh (Nurcholis & Supangkat, 2011) terkait *integrated farming* atau sistem pertanian terpadu yang merupakan sistem pertanian yang mengintegrasikan sektor pertanian, tanaman, ternak, ikan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya (lahan, manusia dan faktor tumbuhan

lainnya) yang mendukung produksi pertanian, peningkatan ekonomi dan pelestarian sumber daya alam serta kemandirian dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan yang dilakukan oleh (Utami & Rangkuti, 2021) tentang sistem pertanian terpadu tanaman ternak untuk peningkatan produktivitas lahan yang menghasilkan bahwa keterpaduan usaha tani ternak dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan yang ditandai dengan adanya reduksi hasil usaha sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga petani.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti terhadap hasil observasi, temuan di lapangan, teori dan penelitian terdahulu tentang pemberdayaan ekonomi melalui *integrated farming* dalam mendukung ketahanan pangan di kampung SDGs Jember dapat diketahui bahwasanya dengan adanya *integrated farming* dapat membantu masyarakat dalam mengatasi permasalahan kelangkaan pupuk dan mahalanya pupuk kimia. *Integrated farming* yang dilakukan di kampung SDGs membantu masyarakat agar memanfaatkan kotoran ternak yang awalnya mereka buang secara sia-sia kemudian setelah adanya *integrated farming* mereka mulai memanfaatkan kotoran ternak dan sisa-sisa sayur dan buah untuk dijadikan pupuk yang nantinya dapat membantu dalam peningkatan hasil pertanian. Dengan adanya *integrated farming* dapat membantu masyarakat agar bisa mengintegrasikan antara pertanian dan peternakan.

1. Pendampingan

Pendampingan di kampung SDGs dalam rangka mencapai tujuan SDGs dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, salah satunya adalah dengan mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong guna menciptakan rumah pangan lestari. Pendampingan ini bukan hanya mengarah pada peningkatan ekonomi dan ketahanan pangan, tetapi juga membangun kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya mereka secara berkelanjutan, sesuai dengan tujuan SDGs. Pendampingan dan pengarahan juga dila-

kukan kepada masyarakat di kampung SDGs agar memanfaatkan lahan belakang rumah untuk budidaya ikan adalah langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Pendampingan dan pengarahan langsung kepada masyarakat memastikan bahwa mereka secara aktif terlibat dalam proses pengelolaan lahan untuk rumah pangan lestari dan budidaya ikan.

a. Rumah Pangan Lestari

Rumah pangan lestari yang ada di kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan dengan ditanami sayuran atau cabe agar bisa menambah pendapatan dan mendukung ketahanan pangan. Pengurus kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar rumahnya agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya dengan ditanami tomat, cabe dan sayuran akan memudahkan masyarakat ketika memerlukan tomat atau sayuran tidak perlu pergi ke pasar dan dapat menghemat pengeluaran keluarga serta dapat menambah pendapatan jika hasil tanamannya dijual ke pasar atau masyarakat sekitar.

Ketahanan pangan merupakan salah satu upaya untuk bertahan dari krisis ekonomi dan krisis pangan yang ada di Indonesia. Kampung SDGs Sukorejo memiliki upaya untuk mewujudkan kampung ketahanan pangan dengan membentuk Rumah Pangan Lestari. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan motivasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya mewujudkan ketahanan pangan. Selain itu, masyarakat juga diberikan pemahaman terkait masalah ketersediaan pangan dengan cara memberikan edukasi dan pelatihan tentang tata cara memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayuran agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri tanpa menunggu adanya bantuan dari pihak lain. Rumah pangan lestari yang ada di kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari memanfaatkan lahan kosong yang ada di pekarangan dengan ditanami sayuran atau cabe agar bisa

menambah pendapatan dan mendukung ketahanan pangan. Pengurus kampung SDGs Sukorejo Bangsalsari memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitar rumahnya agar bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya dengan ditanami tomat, cabe dan sayuran akan memudahkan masyarakat ketika memerlukan tomat atau sayuran tidak perlu pergi ke pasar dan dapat menghemat pengeluaran keluarga serta dapat menambah pendapatan jika hasil tanamannya dijual ke pasar atau masyarakat sekitar.



Gambar 4.7 Kegiatan pendampingan rumah pangan lestari

Pemanfaatan lahan kosong untuk mewujudkan ketahanan pangan yang ada di kampung SDGs Sukorejo sesuai dengan pendapat Sugi-arso (2018) program pemanfaatan tanah pekarangan atau lahan kosong memiliki tiga manfaat secara sekaligus, yakni peningkatan nilai-nilai konservasi, nilai ekonomi, dan nilai ketahanan pangan. Adapun selengkapnya dijelaskan sebagaimana uraian berikut:

- 1) Nilai konservasi, yakni konservasi lingkungan, dimana tanah pekarangan dapat digunakan sebagai daerah resapan air melalui pembuatan lubang resapan biopori, sehingga setiap rumah tangga akan mampu melakukan konservasi air. Hal ini akan membantu recharges air ke dalam tanah sehingga akan menjadi cadangan untuk kebutuhan masyarakat pada saat musim kemarau yang kering.
- 2) Nilai ekonomi, yakni melalui peningkatan wirausaha agribisnis, dimana pemanfaatan lahan pekarangan dengan penanaman tanaman hortikultura seperti sayuran, bumbu-bumbu dapur, dan buah-buahan akan mendatangkan keuntungan ekonomi bagi keluarga. *Pertama*, kebutuhan akan sayur dan bumbu dapur dengan standar kualitas tinggi, bergizi, dan aman dapat dicukupi oleh dirinya sendiri tanpa harus membeli dari luar. Apalagi jika dilakukan secara intensif, maka dapat menghasilkan nilai ekonomi yang lebih besar karena ibu-ibu rumah tangga dapat menjual hasil petanian rumah tangga tersebut ke pasar. *Kedua*, pemanfaatan lahan pekarangan tidak membutuhkan banyak biaya karena didukung dengan pemanfaatan teknologi terapan sederhana, seperti misalnya pembuatan pupuk organik sendiri.
- 3) Nilai ketahanan pangan, melalui penanaman tanaman hortikultura seperti sayuran, bumbu-bumbu dapur, dan buah-buahan akan menjamin ketahanan pangan keluarga. Apalagi sayuran dan tanaman bumbu dapur seperti cabai, merupakan bahan pokok yang dikonsumsi setiap hari.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Maulana et al., 2021) tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanaman Sayuran di Lahan Kosong Upaya

Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kampung Kubang Bango, yang menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat melalui penanaman sayuran di lahan kosong mampu meningkatnya kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan lahan kosong sebagai lahan yang lebih memiliki daya guna dan nilai jual bagi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan di kampung SDGs dengan memberikan edukasi, pemahaman dan pelatihan tentang pemanfaatan lahan kosong untuk budidaya sayuran sudah mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan lahan kosong dan budidaya tanaman sayuran untuk meningkatkan ekonomi serta kebutuhan pangan. Dengan adanya program ini masyarakat merasa terbantu dikarenakan kebutuhan pangan mereka dapat terpenuhi tanpa perlu membeli ke pasar.

b. Budidaya ikan

Pendampingan masyarakat dalam budidaya ikan memiliki beberapa tujuan, seperti meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam, meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola keuangan, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Program ekonomi kreatif yang dilakukan dengan memanfaatkan potensi alam yang ada disekitarnya dengan tujuan agar dapat menambah penghasilan masyarakat. Pemanfaatan lahan kosong yang ada disekitar rumah warga, salah satunya digunakan untuk budidaya ikan nila dan lele. Dengan adanya budidaya ikan ini dapat menambah pendapatan masyarakat dengan menjual hasil panen ikannya.

Hasil temuan dalam penelitian ini tentang model pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pendampingan sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Departemen Sosial dalam penelitian (Rahmawati & Kisworo, 2017:164) bahwa pendampingan adalah suatu proses pemberian kemudahan atau fasilitas yang diberikan pendamping kepada klien dalam mengidentifikasi kebutuhan dan memecahkan masalah serta mendorong tumbuhnya inisiatif dalam

proses pengambilan keputusan sehingga kemandirian klien secara berkelanjutan dapat diwujudkan. Proses pendampingan dalam pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang diambil untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program pelatihan atau inisiatif pemberdayaan lainnya.



Gambar 4.8 Kegiatan budidaya ikan

2. Bantuan modal

Kampung SDGs memiliki beragam program pemberdayaan dalam pengembangan ekonomi masyarakat seperti kedai mustahik dan usaha pembibitan yang mendapat bantuan dari BAZNAS. Bantuan modal memainkan peran penting dalam program pemberdayaan, dengan memberikan modal individu dan kelompok dapat mendirikan atau memperluas usaha mereka, menciptakan kehidupan yang berkelanjutan dan berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Usaha pembibitan buah yang ada di kampung SDGs dilakukan oleh salah satu warga dengan mendapat bantuan modal awal dari *islamic social finance* sebesar Rp.500.000 dan saat ini sudah dapat berkembang pesat dengan omset yang mencapai puluhan juta. Keberhasilan program pember-

dayaan bergantung pada keterlibatan masyarakat dan kerja keras serta kemauan untuk berjuang demi kehidupan yang lebih baik.

Hasil temuan dalam penelitian ini tentang model pemberdayaan ekonomi melalui pemberian bantuan modal sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Frianto (2012) dalam penelitian (Dadek, 2021) bahwa modal merupakan uang yang ditanamkan oleh pemiliknya sebagai pokok untuk memulai usaha maupun untuk memperluas usaha yang dapat menghasilkan sesuatu untuk menambah kekayaan. Dalam pemberian modal ada hal yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana pemberian bantuan modal tidak menimbulkan ketergantungan bagi masyarakat dan juga dapat mendorong masyarakat agar dapat berkembang ke arah yang lebih baik.



Gambar 4.9 Kegiatan pemberian tambahan modal pembibitan

3. Jaringan Bisnis

Program pemberdayaan kampung SDGs dilakukan melalui kegiatan ekonomi kreatif dengan menciptakan produk sabun cuci bunda, keripik jamur, budidaya ikan dan usaha pembibitan berbagai macam buah. Dalam pemasaran produk yang dihasilkan dilakukan melalui mahasiswa dan kerjasama dengan toko-toko sekitar.

Bibit buah yang dihasilkan sudah dipasarkan melalui jual beli online sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dari berbagai daerah dan kerjasama dengan pihak pemerintah yang akan melakukan kegiatan reboisasi.



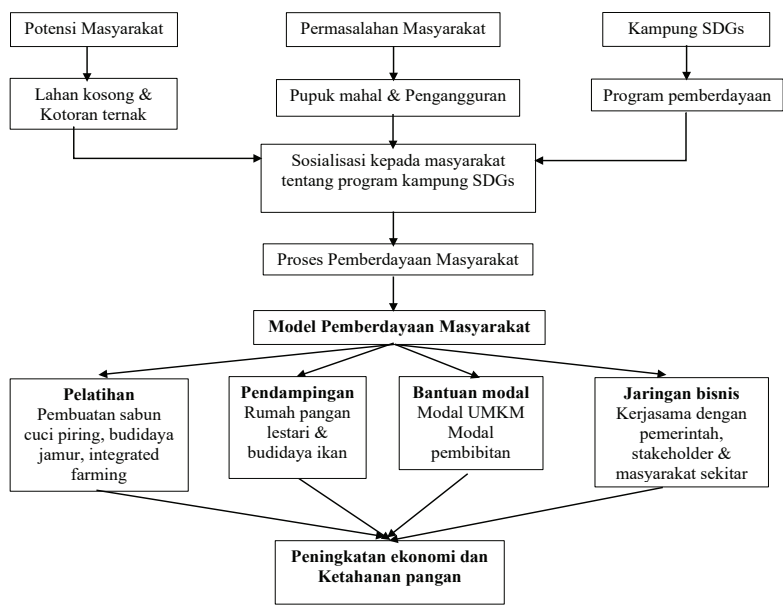
Gambar 4.10 Kegiatan kerjasama jaringan bisnis pembibitan

Program ekonomi kreatif yang ada di kampung SDGs Sukorejo bertujuan untuk memperbaiki pendapatan masyarakat yang kurang mampu dan lemah dalam ekonomi. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat dapat memahami tentang ilmu dan cara budidaya jamur, budidaya ikan, pembuatan sabun cuci piring dan pembibitan buah untuk pengetahuan di masa yang akan datang dan sebagai cara untuk memanfaatkan potensi agar dapat meningkatkan pendapatan dan mencegah kemiskinan. Manusia diciptakan di muka bumi dan dianjurkan untuk berusaha memperoleh pendapatan agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidup di dunia supaya mampu beribadah kepada Allah SWT.

Pemanfaatan potensi yang ada di kampung SDGs merupakan salah satu bentuk implementasi dari pemanfaatan alam atau bumi

Allah, dengan adanya proses dan partisipasi masyarakat dalam program ekonomi kreatif yang ada di kampung SDGs dapat memberikan dampak perbaikan pendapatan atau ekonomi dari hasil penjualan jamur, sabun cuci dan bibit tanaman buah. Hal ini tentu akan berdampak pada kemampuan masyarakat dalam membeli komoditas baik itu komoditas besar atau kecil yang menjadi salah satu indikator pemberdayaan menurut (Schuler & Riley, 1996). Kemampuan masyarakat dalam memilih kebutuhan sehari-hari menjadi salah satu indikator untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Tujuan adanya pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di kampung SDGs adalah untuk perbaikan kehidupan masyarakat, peningkatan pendapatan dan dan dan kemandirian ekonomi masyarakat.

Gambar 4.11 Model pemberdayaan masyarakat di kampung SDGs



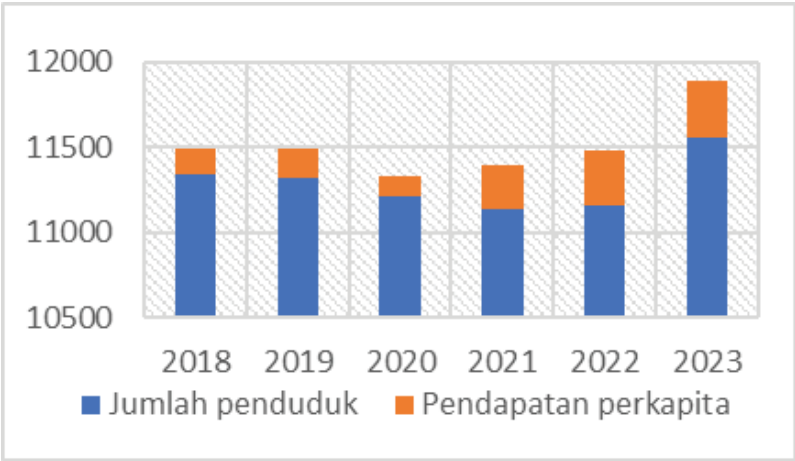
Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Hasil penelitian ini pendukung penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Halil, 2023) tentang pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat desa kedungwara Timur Kecamatan peragaan Kabupaten Sumenep. Kegiatan pemberdayaan berbasis ekonomi kreatif dapat membantu meningkatkan kemandirian masyarakat dan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengurangi tingkat kemiskinan yang ada dimasyarakat. Program ekonomi kreatif yang ada di kampung SDGs mendukung salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu membentuk ekonomi maju, kreatif dan berkelanjutan.

Keberhasilan program pemberdayaan masyarakat bukan hanya berdampak pada masyarakat selaku penerima manfaat akan tetapi juga berdampak pada pembangunan lingkungan dan daerah (Arifin, 2005: 94). Secara umum tujuan program pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang sesuai dengan norma perilaku dan sistem perekonomian yang memiliki tujuan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dengan tetap memperhatikan keadaan lingkungan dan sosial masyarakat.

Kampung SDGs merupakan inisiatif program yang bertujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Keberhasilan Kampung SDGs dalam menyediakan kebutuhan dasar masyarakat seperti pakaian, tempat tinggal, dan makanan, membuktikan efektivitas program ini. Dengan suksesnya program Kampung SDGs, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka secara mandiri dan berkelanjutan. Perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan pelatihan dan program ketahanan pangan seperti rumah pangan lestari telah mendukung mencapai tujuan SDGs, khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan kelaparan. Keberhasilan program yang ada di kampung SDGs dapat dilihat dari peningkatan jumlah penduduk dan pendapatan per kapita yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.12 Jumlah penduduk & pendapatan per kapita kampung SDGs



Sumber: Data diolah peneliti, 2024

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahwa keberadaan Kampung SDGs telah menyebabkan peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Namun, terjadi penurunan pendapatan pada tahun 2020 akibat pembatasan aktivitas yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Pada tahun-tahun berikutnya, pendapatan masyarakat meningkat secara bertahap. Program Kampung SDGs memberikan kontribusi besar terhadap ekonomi desa, dengan memperluas kesempatan kerja sehingga mengurangi tingkat pengangguran. Selain itu, program ini juga mengembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan masyarakat, yang berdampak pada peningkatan pendapatan. Dampaknya tidak hanya terasa pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan masyarakat yang terus membaik berkat adanya Kampung SDGs.

C. Model Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Sakinah dalam Mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui tentang model pemberdayaan yang ada di kampung Sakinah sebagai upaya mengatasi permasalahan Pernikahan Dini dalam mendukung tujuan SDGs kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Hasil temuan di kampung Sakinah terdapat tiga program yang dalam penerapannya sesuai dengan matra pemberdayaan sebagai upaya untuk meningkatkan kemandirian dan kapasitas individu atau kelompok dalam mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu. Program tersebut yaitu program binaan, penyampaian materi ketika acara wali-mah dan silaturahmi ke rumah warga.

Dalam konteks pemberdayaan dapat dilakukan dengan tiga aras atau matra pemberdayaan, yaitu aras mikro, aras mezzo dan aras makro. Di kampung sakinah terdapat tiga program yang dalam penerapannya sesuai dengan matra pemberdayaan, antara lain: (Suharto, 2009:66)

1. Program Binaan

Di kampung Sakinah Jember upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini salah satunya melalui program binaan pada kelompok masyarakat yang dilakukan setiap 1 bulan 1 kali secara bergilir di rumah anggota binaan. Dalam kegiatan binaan tersebut ada sesi penyampaian materi tentang peraturan pemerintah yang ada di KUA Kecamatan Mayang dan diskusi terkait problem yang dialami masyarakat agar menemukan solusi dari para penyuluh agama. Dalam kegiatan ini melibatkan tokoh agama, pemimpin masyarakat, dan figur otoritas lainnya dalam mendukung upaya untuk mengatasi pernikahan dini. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan pendidikan kepada orang tua dan masyarakat tentang pentingnya mendukung pendidikan perempuan dan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang serta memasti-

kan akses yang adil dan setara bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan formal dan non-formal.



Gambar 4.13 kegiatan pembinaan di kampung sakinah

Hasil penelitian tentang program binaan yang dilakukan sebagai upaya mengatasi pernikahan sesuai dengan teori matra pemberdayaan aras mezzo. Program pemberdayaan dengan aras mezzo dilakukan dengan membentuk forum diskusi bagi masyarakat yang mengalami masalah yang sama, seperti forum diskusi untuk orang tua atau kelompok yang memiliki permasalahan keluarga (Suharto, 2009:66). Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap masyarakat agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapinya.

2. Sosialisasi ke Sekolah dan Masyarakat

Kegiatan pemberdayaan melalui pendampingan biasanya dilakukan melalui kegiatan sosialisai ke sekolah-sekolah tentang aturan pemerintah mengenai aturan pernikahan, pentingnya pendidikan bagi perempuan dan kesetaraan gender. Kegiatan sosialisasi tentang aturan pernikahan dan pemberdayaan perempuan yang dilakukan oleh penyuluh agama dan pengurus kampung sakinah dilakukan

sebagai upaya untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM). Manfaat adanya sosialisasi ke sekolah-sekolah bisa membuka wawasan remaja tentang pentingnya pendidikan, merencanakan masa depan dan risiko ketika melakukan pernikahan dini.



Gambar 4.14 Kegiatan sosialisasi kepada warga dan anak sekolah

Di kampung Sakinah Jember upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini salah satunya melalui penyampaian pesan yang diselipkan ketika ada acara walimah dan

kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Dalam kegiatan ini, pada sesi ceramah akan disampaikan materi terkait cara membangun keluarga sakinah dan kewajiban suami istri serta diselipkan materi tentang peraturan pemerintah yang ada di KUA Kecamatan Mayang terkait usia minimal melakukan pernikahan.

Hasil penelitian tentang program penyampaian materi ketika acara walimah yang dilakukan sebagai upaya mengatasi pernikahan sesuai dengan teori matra pemberdayaan aras makro. Pemberdayaan yang didasarkan pada aras makro merupakan strategi pemberdayaan sistem besar yang memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak (Suharto, 2009:66). Program penyampaian materi ketika acara walimah dilakukan sebagai upaya untuk menyadarkan masyarakat tentang pentingnya memahami batas usia minimal pernikahan, kewajiban suami istri dan kiat kiat dalam membangun keluarga sakinah.

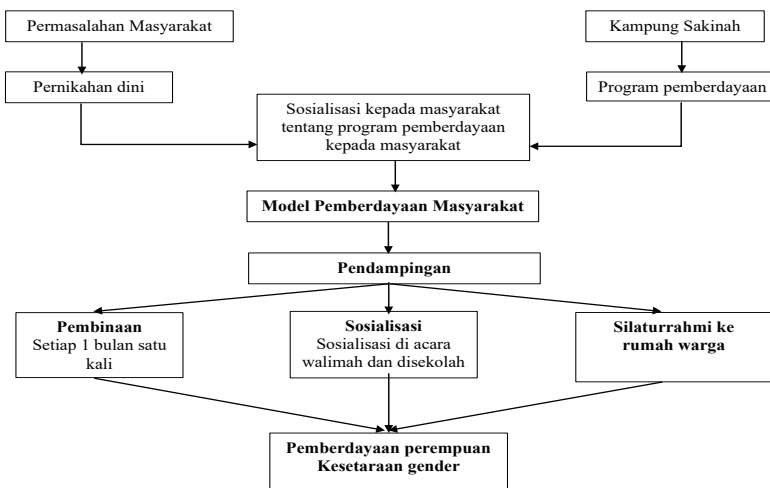
2. Silaturahmi ke Rumah Warga

Di kampung Sakinah Jember upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini salah satunya melalui silaturahmi atau pendekatan ke rumah warga dengan harapan warga lebih leluasa dalam menyampaikan permasalahannya. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan konsekuensi pernikahan dini baik bagi perempuan maupun masyarakat secara umum, serta memberikan dukungan bagi perempuan untuk tetap bersekolah dan mengejar pendidikan tinggi. Kegiatan silaturahmi dilakukan dengan mendatangi rumah warga yang terjadi pernikahan dini dan mempunyai permasalahan keluarga lainnya, penyuluh agama akan memberikan bimbingan dan pemahaman agar keluarga tersebut dapat terbebas dari permasalahan yang dihadapi.

Hasil penelitian tentang program silaturahmi ke rumah warga yang dilakukan sebagai upaya mengatasi pernikahan sesuai dengan

teori matra pemberdayaan aras mikro. Pemberdayaan dengan yang didasarkan pada aras mikro dilakukan terhadap masyarakat melalui pemberdayaan individu, bimbingan dan konseling. Pemberdayaan individu dilakukan dengan memberikan pelatihan keterampilan kepada individu yang kurang mampu untuk membantu mereka meningkatkan peluang kerja dan meningkatkan kemandirian ekonomi mereka (Suharto, 2009:66). Seorang konselor atau mentor bekerja dengan individu untuk membantu mereka mengatasi hambatan pribadi atau profesional, seperti kecemasan, depresi, atau problem permasalahan lainnya.

Gambar 4.15 Model Pemberdayaan dalam Upaya Mengatasi Pernikahan Dini di Kampung Sakinah



Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Permasalahan pernikahan dini menjadi problem setiap daerah di Indonesia yang setiap daerah pasti memiliki program yang berbeda-beda untuk mengatasi permasalahan tersebut. Program binaan, penyampaian materi ketika walimah dan silaturahmi yang ke rumah warga yang dilakukan di kampung Sakinah Jember merupakan

upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pernikahan dini. Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh (Sak-diyah & Ningsih, 2018) yang menyatakan bahwa pentingnya peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalakkan sosialisasi tentang peraturan pemerintah tentang pernikahan. Kegiatan sosialisasi atau penyampaian tentang peraturan undang-undang pernikahan diperlukan mengingat masyarakat yang ada di Kampung Sakinah belum sepenuhnya memahami tentang peraturan pemerintah tentang usia minimal pernikahan

Penerapan program binaan, penyampaian materi ketika wali-mah, penyampaian materi di sekolah dan silaturahmi ke rumah warga sudah dilakukan dari awal berdirinya kampung sakinah pada tahun 2020, untuk melihat tercapainya harapan dan tujuan adanya program binaan diperlukan kriteria untuk mengetahui tentang keluarga sakinah yang ada di kampung sakinah Jember. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kriteria dalam menilai keluarga sakinah dan ketercapaian program yang ada di kampung sakinah Jember dapat ditemukan kriteria keluarga sakinah, antara lain:

a. Pra Sakinah

Pengurus Kampung Sakinah itu memberikan klasifikasi kelompok menjadi Pra Sakinah dengan penilaian keluarga yang masuk kelompok Pra Sakinah tidak bisa dikatakan sakinah disebabkan menikahannya tidak resmi, pernikahannya dibawah umur dan tidak tercatat di KUA kemudian tidak bisa melaksanakan ibadah dan belum bisa memenuhi memberikan kewajiban dzohir dan batin. Untuk saat jumlah kriteria keluarga pra sakinah sudah tidak ada di kampung sakinah jember.

b. Sakinah 1

Pengurus Kampung Sakinah itu memberikan klasifikasi kelompok menjadi Sakinah 1 dengan penilaian keluarga yang masuk

kelompok sakinah 1 pernikahannya sudah tercatat di KUA akan tetapi untuk memberikan kewajiban dzohir dan batin belum sempurna contohnya seperti nafkah dzohir dan batin itu kan sama-sama wajib dan itu belum terpenuhi atau dalam memberikan nafkah dzohir itu tidak lancar kemudian tingkat pendidikan dalam keluarga tersebut masih rendah. Untuk saat jumlah kriteria keluarga sakinah 1 ada sekitar 20% di kampung sakinah jember.

c. Sakinah 2

Pengurus Kampung Sakinah itu memberikan klasifikasi kelompok menjadi Sakinah 2 dengan penilaian keluarga yang masuk kelompok ini pernikahannya sudah tercatat di KUA, kewajiban dzohir dan batin sudah terpenuhi, sudah mampu untuk menghidupi keluarganya, dalam keluarga ini sudah mulai paham tentang pendidikan akan tetapi belum begitu paham terhadap ilmu agama. Untuk saat jumlah kriteria keluarga sakinah 2 ada sekitar 50% di kampung sakinah jember.

d. Sakinah 3

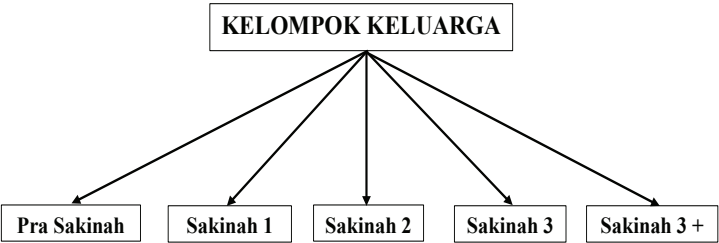
Pengurus Kampung Sakinah itu memberikan klasifikasi kelompok menjadi Sakinah 3 dengan penilaian keluarga yang masuk kelompok ini pernikahannya sudah tercatat di KUA, kewajiban dzohir dan batin sudah terpenuhi, sudah mampu untuk menghidupi keluarganya, sudah berpendidikan dan paham terhadap ilmu agama akan tetapi belum bisa dijadikan contoh teladan yang baik. Untuk saat jumlah kriteria keluarga sakinah 3 ada sekitar 30% di kampung sakinah jember.

e. Sakinah 3 +

Pengurus Kampung Sakinah itu memberikan klasifikasi kelompok menjadi Sakinah 3 + dengan penilaian keluarga yang masuk kelompok ini pernikahannya sudah tercatat di KUA, kewajiban dzohir dan batin sudah terpenuhi, sudah mampu untuk menghidupi keluarganya, sudah berpendidikan, paham terhadap ilmu agama,

ibadahny sudah dilakukan dengan baik dan bisa dijadikan contoh ke keluarga yang lain. Untuk saat jumlah kriteria keluarga sakinah 3+ ada sekitar 10% di kampung sakinah jember.

Gambar 4.16 Kriteria Kelompok Keluarga di Kampung Sakinah Jember



Sumber: Data diolah Peneliti, 2024

Kampung Sakinah Jember memiliki program binaan, sosialisasi ke sekolah dan ketika acara walimah serta silaturahmi ke rumah warga sebagai upaya mengatasi permasalahan pernikahan dini dan mendukung pencapaian tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) nomor 5, yaitu mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam acara binaan penyuluh agama bukan hanya memberikan pengetahuan tentang undang-undang pernikahan akan tetapi dalam acara tersebut masyarakat juga diberi pemahaman tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan agar tidak terjadi lagi kasus perempuan yang putus sekolah. Upaya untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan bukan hanya menjadi tugas pemerintah saja melainkan tugas semua pihak untuk saling mengingatkan tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan serta pandangan masyarakat tentang pemberdayaan perempuan.

Model pemberdayaan masyarakat kampung zakat dalam mengurangi kemiskinan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, pemberian modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Model pemberdayaan masyarakat di Kampung *Sustainable Development Goals* (SDGs) dilakukan mela-

lui pelatihan, pendampingan, pemberian modal dan jaringan bisnis dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan serta ekonomi maju dan kreatif.

Model pemberdayaan masyarakat di Kampung Sakinah dalam mengurangi permasalahan pernikahan dini, mendukung pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender dilakukan melalui kegiatan pendampingan yang meliputi program binaan, penyampaian materi ketika acara sosialisasi di sekolah dan acara walimah, serta silaturahmi ke rumah warga sebagai upaya mengatasi permasalahan pernikahan dini.

Dengan demikian, gambaran mengenai model pemberdayaan masyarakat dalam mendukung SDGs dapat membantu meningkatkan keterlibatan masyarakat, meningkatkan keterampilan dan wawasan, meningkatkan kemitraan dan kolaborasi, dan meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Para pengelola kampung zakat, kampung SDGs dan kampung sakinah dapat membangun kerja sama dengan berbagai pihak untuk suksesnya proses pemberdayaan masyarakat, baik itu masyarakat lokal, *stakeholder* maupun pihak pemerintahan. Dengan adanya kerja sama dengan berbagai pihak diharapkan dapat menjadikan ekonomi daerah tersebut lebih maju dan menjadikan masyarakat yang lemah menjadi lebih berdaya dan berkurangnya jumlah kemiskinan. Dengan ini diharapkan para pengelola kampung zakat kampung SDGs dan kampung Sakinah agar dapat memperluas kerja sama dengan pihak lain guna mendukung suksesnya pemberdayaan di daerah tersebut. □

DAFTAR PUSTAKA

- Adriani, E., & Wahyudi. 2015. Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 15(2), 47–51.
- Ansoriyah, F., Purnaweni, H., & Astuti, R. S. 2022. The Framework of Zakat Managing Organization (OPZ) Synergy in Achieving SDGs Target. *International Journal of Management Science and Business Administration*. <https://doi.org/10.18775/ijms-ba.1849-5664-5419.2014.87.1001>
- Arifin, Z. 2005. *Dasar-dasar Manajemen Syariah*. Alfabeta.
- Asy'ari, M. 1997. *Islam, Etos Kerja dan Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Lesfi.
- Badan Pangan Nasional. 2018. Pemberdayaan Pekarangan Pangan. *Badan Pangan Nasional*. <https://badanpangan.go.id/blog/post/pemberdayaan-pekarangan-pangan>
- Bahransyaf dkk. 2012. *Pola Pemberdayaan Masyarakat Miskin Perkotaan*. B2P3KS PRESS.
- Bambang, Azis, A. A., Kalsum, U., Akmal, S., Alfiana, & Almahdali, F. 2023. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan dan Akses Pembiayaan. *East Journal of Innovative Community Services*, 1(03), 142–155. <https://doi.org/10.58812/ejincs.v1i03.122>
- Bappenas. 2019. *Indonesia 2045: Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*.
- Bappenas. 2019. *Indonesia SDG's VNR Empowering People and Ensuring Inclusiveness and Equality*.

- Bappenas. 2023. *Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan*. 2023, 01, 221.
- BPK. 2019. *Peran Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Sustainable Development Goals (SDGs)*.
- Dadek, A. 2021. *Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Penguatan UMKM*. https://bappeda-dev.acehprov.go.id/media/2022.08/analisis_umkm1.pdf
- Frianto. 2012. *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*. Unit Penerbit dan Percetakan PT. Rineka Cipta.
- Gm, I. 2019. Desa Lain Diharapkan Ikuti Jejak Sukorejo Bentuk Kampung SDGs. *Lontar News*. <https://lontarnews.com/2019/07/16/sosial-desa-lain-diharapkan-ikuti-jejak-sukorejo-bentuk-kampung-sdgs/>
- Halil, H. 2023. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Kreatif dalam Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Kaduara Timur Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep. *Ibrah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 99–112.
- Hamelik, O. 2001. *Manajemen Ketenagakerjaan Pendekatan Terpadu*. PT Bumi Aksara.
- Hasan, S., Pomalingo, N., & Bahri, S. 2018. Pendekatan dan Strategi Pengembangan Sistem Pertanian Terintegrasi Ternak-Tanaman Menuju Ketahanan Pangan Nasional. *Prosiding Seminar Nasional Integrated Farming System*, 1(1), 1–9.
- Hendra, T. 2017. Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Al-Quran. *Jurnal Hikmah*, 11(2), 191–213.
- Hutomo, M. Y. 2000. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi*. Bappenas.
- Jember, B. K. 2023. *Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Jember*.
- Khoirun, U., Dan, N. ', & Izzah, K. 2020. Pendampingan Pemberdayaan Potensi Masyarakat dalam Bidang Pertanian dan Home Indu-

- stry di Desa Butuh Kras Kediri pada Masa Pandemi Covid-19. *JPMD: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Desa*, 1(2) <https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/jpmd>
- Kieffer, C. H. 2017. Prevention in Human Services Citizen Empowerment Citizen Empowerment: A Developmental Perspective. 3114(July). <https://doi.org/10.1300/J293v03n02>
- Mardikunto, T. 2013. *Model Model Pemberdayaan Masyarakat*. UNS Press.
- Maulana, A., Novitasari, E., Mulyani, E., & Kartika, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Penanaman Sayuran di Lahan Kosong Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Kampung Kubang Bango. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 53(Desember).
- Miftahuddin, H. 2021. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Peningkatan Ekonomi*. UIN Walisongo Semarang.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publication.
- Mohanty, M. 1995. On the Concept of Empowerment. *Economic and Political Weekly*, 30(24), 1434–1436. <http://www.jstor.org/stable/4402876>
- Muchlis, A. A., Rahmawati, E., Zakariyah, M., & Wagistina, S. 2023. Upaya mengefektifkan pemilahan sampah dalam upaya pembangunan infrastruktur strategis dengan berbasis teknologi ramah lingkungan menuju Indonesia emas 2045. 3(1), 76–85. <https://doi.org/10.17977/um063v3i12023p76-85>
- Mustofa, & Khotib. 2023. Mosque-Based Community Empowerment Model Through Productive Zakat Distribution BAZNAS East Java Province. *Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA)*, 4(2), 222–235.
- Nur, S., Luthfyah, A., Widyawati, N., Rahayu, I., & Rokhim, A. 2022. Analisis Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kampung Sustainable Development Goals (Sdgs). 3(2), 267–285.

- Nurcholis, M., & Supangkat, G. 2011. Pengembangan Integrated Farming System untuk Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Budidaya Pertanian Urgensi dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*, 71–84.
- Omer, M. A. B., & Noguchi, T. 2020. A conceptual framework for understanding the contribution of building materials in the achievement of Sustainable Development Goals (SDGs). *Sustainable Cities and Society*, 52, 101869. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2019.101869>
- Padda, I. U. H., & Hameed, A. 2018. Estimating multidimensional poverty levels in rural Pakistan: A contribution to sustainable development policies. *Journal of Cleaner Production*, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.05.224>
- Pizzi, S., Caputo, A., Corvino, A., & Venturelli, A. 2020. Management research and the UN sustainable development goals (SDGs): A bibliometric investigation and systematic review. *Journal of Cleaner Production*, 276. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124033>
- PPN/Bappenas, K. 2020. *Peta Jalan SDGs Indonesia Menuju 2030*.
- Prakoso, M. A., & Arum, K. 2023. Pengaruh Bantuan Modal dan Pendampingan terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Kasihan , Kabupaten Bantul, 13(2), 111–122.
- Pretty, J. 2006. Agroecological Approaches to Agricultural Development. *Rimisp-Latin American Center for Rural Development* (Vol. 1).
- Purwanto, A. 2023. Strategi pemberdayaan zakat lembaga amil zakat nasional daarul tauhiid peduli Yogyakarta. *AT TAUZI': Jurnal Ekonomi Islam*, 23(1), 1–10.
- Qomaro, G. W., & Lestari, M. 2022. *Distribution of Zakat and The Empowerment of MSMEs in Bandungrejo: Experience of BAZ-NAS Malang*.
- Rahmawati, E., & Kisworo, B. 2017. Peran Pendamping dalam Pem-

- berdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161–169. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>
- Rizal, Ghofur, R. A., & Utami, P. 2023. The Role of Muslim Generation Community at Zakat Collection on Realizing Sustainable Development Goals (SDGs) in the Era of Digital Society 5.0. 22(1), 105–118.
- Sahara, I. A., & Ramadhani, K. M. 2023. Pemberdayaan Ekonomi Desa Ridomanah dalam Mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). *Proceedings Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2(6).
- Sakdiyah, H., & Ningsih, K. 2018. Mencegah Pernikahan Dini untuk Membentuk Generasi Berkualitas. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, 26(1), 35–54.
- Schuler, S. R., & Riley, A. N. N. P. 1996. Rural Credit Programs and Women's Empowerment in Bangladesh. 24(4), 635–653.
- Simkiss, D. 2015. The millennium development goals are dead; long live the sustainable development goals. *Journal of Tropical Pediatrics*, 61(4), 235–237. <https://doi.org/10.1093/tropej/fmv048>
- Solihin, K., & Latifah, U. 2021. Technology & Community Based Zakat, Infaq, And Sodaqah Fundraising Model Khabib. *Nusantara Islamic Economic Journal*, 1(1), 26–39. <https://journal.unis-nu.ac.id/NUIEJ/article/view/55>
- Sugiarso, S., Riyadi, A., & Rusmadi, R. 2018. Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pemanfaatan Tanah Pekarangan (PTP) untuk Konservasi dan Wirausaha Agribisnis di Kelurahan Kedung Pane Kota Semarang. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 17(2), 343. <https://doi.org/10.21580/dms.2017.172.2433>
- Suharto, E. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (A. Gunarsa (ed.); 3rd ed.). Refika Aditama.

- Sulistiyani, A. T. 2017. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (2nd ed.). Gava Media.
- Sumodiningrat, G. 1999. Jaring Pengaman Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 14(3) (3), 138–139.
- Sutrisno, & Haron, R. 2022. Zakat contribution model in entrepreneurship empowerment of zakat institutions: Case study of Lazizmu Pusat. *Nusantara Islamic Economic Journal*, 1(2), 142–154.
- Syahril, Abdullah, W., & Syahrudin. 2019. Model Pemberdayaan Ekonomi Dengan Filantropi Islam Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat. *Iqtishadia: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v6i1.2296>
- Tirmidzi, A. Y. A., Riyadi, D. S., & Yunus, B. M. 2022. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa Perspektif al-Qur'an: Menuju Kewirausahaan Sosial melalui Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1)
- Utami, S., & Rangkuti, K. 2021. Integrated agriculture systems for land productivity improvement: A Review. *AGRILAND Jurnal Ilmu Pertanian*.